

Buletin

MAHKAMAH



BANGUN!

Edisi

28/V/2014



KUNJUNGI SITUS KAMI DI MAHKAMAHNEWS.ORG



Advertise

1

ARTIKEL HARI
INI ▼

BERANDA

BERITA ▼

OPINI

RESENSI

REHAT ▼

PARAMETER

DOWNLOAD ▼

TENTANG KAMI

POJOK ALUMNI ▼

TRENDING NOW Rupa Penerus Budi Utomo - 19 May 2014

Search ...



BUKU

Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto



18 MAY 2014 BY SEKAR BANJARAN AJI ON BUKU, RESENSI

Mahzab Agraria Bulaksumur

Editor

Editorial: Hartono Soetarto

TOPIK TERKINI

1908 – 2014 : Bangkit Dengan
Mendengar – Sebuah Mixtape

Malaikat Kecil yang Ajaib

Mahzab Agraria Bulaksumur

Tiga Perenungan untuk
Hardiknas 2014

Marsinah: The Light That Will
Never Goes Out



Advertise

Login

MOST RECENT GALLERY



My Gallery

MOST RECENT VIDEO



MOST RECENT FEATURES

POPULAR FEATURES

RECENT ARTICLE

SIAPA KAMI?

Kami adalah bagian dari mereka yang menyebut dirinya mahasiswa. Kami masih mencari makna kata “maha”, dan mungkin ini salah satu jalan untuk menemukannya.

Satu untuk meniti dan berbagi informasi. Satu untuk belajar mengawasi, sisanya menyemangati diri untuk berkreasi, selebihnya mencoba bersosialisasi dengan kawan-kawan satu visi.

Salam satu visi!

BANGUN! Ayo mendewasakan Indonesia!

Proses penulisan buletin ini memang tidak sepanjang proses negara ini menjadi Indonesia yang sekarang. Proses penulisan buletin ini juga tidak seheroik proses sejarah bangsa Indonesia. Proses buletin ini bahkan tak cukup layak disebut dalam proses yang mendewasakan nusantara ini menjadi lebih Indonesia. Proses penulisan buletin ini hanyalah tahap singkat dimana pemikiran diramu dengan fakta hingga tak sekedar layak untuk dibaca tapi juga direnungkan oleh pembaca sekalian.

Ada terlalu banyak peristiwa yang terjadi di masa lalu. Namun banyak pula yang terlupakan dari masa lalu itu sendiri. Buletin ini menyajikan penggalan masa lalu itu dalam bentuk yang lebih padat supaya kita tidak menjadi orang-orang bodoh karena mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya.

Selain sebagai sarana pengingat, buletin ini juga sebagai piranti untuk membangunkan kita dari kelamnya masa lalu. Kita harus tetap positif dalam menyongsong masa depan. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang kerdil karena trauma yang tak terobati. Tahun ini, kita kembali menyambut era baru, merujuk kepada peralihan estafet kepemimpinan negeri ini. Seharusnya momen tersebut bisa mendewasakan kita dalam menyikapi proses demokrasi yang telah kita pilih, menjadi tahap untuk meneruskan keberlangsungan negara ini.

Dapat dikimpulkan bahwa buletin ini adalah rangkuman dari segala perkara baik di masa lalu dan masa sekarang, yang lantas dikumpulkan menjadi satu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mendewasakan diri kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti salah satu judul tulisan dalam buletin ini, menakar masa lalu untuk menatap masa depan.

Akhir kata, mungkin semua orang sudah akrab dengan membaca. Mungkin juga semua orang telah fasih menulis. Namun menjadi mahasiswa kita belajar untuk mengenal satu kata lagi selain membaca dan menulis: lawan! Tidaklah berguna kaum cendekiawan itu jika tanpa perlawanan. Cendekiawan yang lupa akan fungsi sosialnya hanya akan jadi sampah.

Baca, tulis, **LAWAN!**

Selamat berkontemplasi!



Pelindung:

Tuhan Yang Maha Esa

Dewan Penasihat:

Zainal Arifin M, S.H., LL.M.

Jeremias Lemek, S.H., LL.M.

Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni:

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

Dewan Redaksi:

Abraham Adi, Efi Handayani, Arifanny Faizal,
M. Nurdin

Divisi Umum:

Pemimpin Umum: Moses Parlindungan

Sekretaris Umum: Elisabet Regitta

Bendahara Umum: Dyah Wara

Divisi Redaksi:

Pemimpin Redaksi: Sekar Banjaran Aji

Redaktur Pelaksana: Bunga Caesaria & Ageng
Prabandaru

Redaktur Web & Mading: Gati Sulistyo

Redaktur Leaflet & Kortem: Agnes Sulistya

Staf: Ahmad Halim Pradana, Putu Shanti,

Christy Ullisa, Dionisius Pandan

Divisi Litbang

Kepala Divisi Litbang: Fransisca FRC

Kasubdiv Riset dan Penelitian: Agung Nugroho

Kasubdiv PSDM: Hanifah Febriani

Staf: Benedictus Wisnu, Lusi Yolanda, Fadjar

Gopas, Lerry Alif, Petrus Sian E, Hilman

Fathoni, Pramudana Gia, Yohanes Aditya

Divisi Perusahaan:

Kepala Divisi Perusahaan: Pitra Aryani

Kasubdiv Marketing: Hanindito Danusatya

Kasubdiv PDD: Dayinta Agni

Kasubdiv Media & Fotografi: Pradipta W

Staf: Sativa Eka, Anastasia Cynthia, Amalina N,

Indri Tedja

Illustrator: Anastasia Cynthia

Layouter: Elisabet Regitta

Editorial

3

Laporan Utama

Pemilu Pondasi Kebangkitan Bangsa 5

Mengembalikan Pers kepada Rakyat 9

Laporan Khusus

Menakar Masa Lalu Untuk Menatap Masa

Depan 13

Parameter

Kata Massa tentang Media 17

Seputar Kampus

Sosialisasi Sanksi Akademik Masih

Sekedar Wacana 21

Ius Constituendum

Konservatisme Hakim Konstitusi 23

Tentang Sampul

Dalam keadaan mata tertutup, apa yang bisa engkau

Dalam keadaan tubuh terikat, bagaimana bisa engkau

Mata tertutup bisa dibilang mewakili pandangan ba

akan isu-isu penting yang mempengaruhi kelangsun

depannya. Dan dengan pandangan yang masih men

di-masa depan pun pasti akan sulit, bukan?

Model: Petrus S Edvansa.

Pengambil gambar: Hilman Fathoni.

Pengarah gaya: MP Ompusunggu.

Tempat: Hutan Lembah UGM.

Opini
Buruh dan Keadilan 26

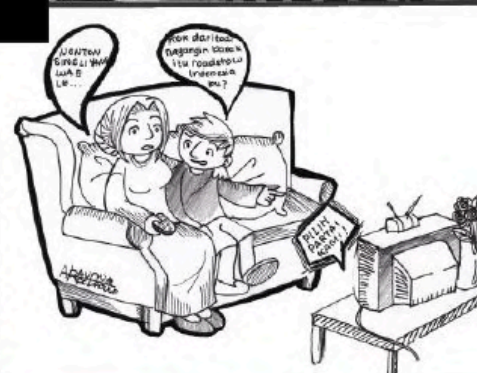
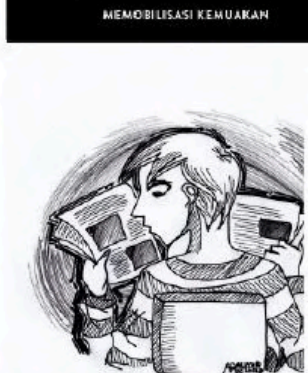
Konstelasi Politik Penyelesaian
Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu 28

Sosok
Berbeda Bukan Berarti Tak Bisa 30

Resensi
Memobilisasi Kemuakan (2014) 33

Sastra
Half Moon (Part 2) 36

Jendela
Bangun dari Dunia Retak 38



lihat?
au melangkah maju?
ngsa kita yang masih kabur
gan negeri kita ke
gawang itu, melihat prospek



Badan Penerbitan Pers Mahasiswa

MAHKAMAH

BPPM FH UGM

Kirimkan Saran dan Kritik anda ke:

buletin.mahkamah@gmail.com

Contact Person:

Moses: 08982923834

Sekar: 085729722497

WAJAH INDONESIA TIDAK LEBIH BAIK

Sekar Banjaran Aji

“

Apabila kita berkaca dengan masa lalu dan kendala masa lalu tetaplah menjadi kendala masa sekarang maka sebenarnya kita tidak maju melainkan melangkah mundur.

-Mikael Gorbachev

”

Sekarang tahun 2014, berarti sudah 69 tahun Indonesia merdeka dan sudah 16 tahun terhitung sejak kata reformasi menggema di seluruh penjuru Indonesia ini. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia juga sudah mengalami 6 kali pergantian presiden. Indonesia juga sudah mengalami 10 pemilu. Lantas, apakah kita sudah menjadi bangsa yang dewasa dalam bernegara?

Sejarah menuliskan bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bahkan sudah termashyur sejak zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 dan kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1350 M. Cerita lama tersebut seperti diulang kembali ketika akhirnya bangsa Indonesia memutuskan untuk menjadi sebuah kesatuan sebagai negara pada tahun 1945, setelah "tertempa" sekian lama di tangan bangsa penjajah.

Negara, seperti pendapat Aristoteles, adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Maka, menyambung kata-kata tersebut, sesungguhnya bangsa Indonesia menginginkan kehidupan yang lebih baik setelah terbentuknya negara kesatuan itu. Hal tersebut bisa kita lihat dalam alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konstitusi tersebut dikemukakan empat tujuan bangsa Indonesia yaitu: (buka UUD)

Dalam proses perjalanannya sebagai bangsa dan negara, Indonesia pernah mengalami masa-masa suram ketika terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat. Sebagai contoh, dari hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997 – 1998 yang dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terjadi penghilangan 14 orang secara paksa selama tahun-tahun tersebut. Dalam perjalanannya, penyelesaian pelanggaran berat HAM di nusantara masih menemui banyak kendala, antara lain penolakan TNI, penolakan Jaksa Agung, dan bahkan keengganan para saksi dan korban untuk memenuhi panggilan penyidik guna memberikan saksi sehubungan adanya pelanggaran HAM yang berat.¹ Hal tersebut pula yang membuat penanganan kasus HAM hingga saat ini menemui jalan buntu.

Proses demokrasi, yang digadagadag akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih dewasa dan bermartabat, nyatanya masih jauh panggang dari api. Adagium *vox populi vox dei* seperti kehilangan relevansinya, sebab suara rakyat yang dianggap sebagai suara Tuhan diperjualbelikan dengan murah lewat berbagai cara. Keadaan memprihatinkan tersebut bisa kita tengok pada pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berlangsung pada 9

April 2014 lalu, dimana masih banyak ditemukan kecurangan. Bentuk kecurangan yang terjadi juga makin beragam, misalnya dengan pemberian uang tunai saat malam sebelum hari pemilihan, pemberian polis asuransi, pemberian barang, dan pemberian program dari uang pribadi ataupun membongkang program bantuan pemerintah¹⁾.

Banyaknya kecurangan dalam pemilu di Indonesia, digambarkan oleh Todung Mulya Lubis dengan sebutan *survival of the rich*. Walau ada juga yang *survive* bukan berasal dari kalangan *the rich*-bisa karenasang calon ditopang oleh *the rich*, seorang pesohor, atau kalangan beruntung. Kalangan apa yang melatarbelakanginya yang jelas pembajakan pemilu oleh uang telah menggerus substansi kedaulatan rakyat. Karena itu, jangan heran kalau produk-produk legislasi kita seperti produk pesanan kelompok-kelompok kepentingan, terutama mereka yang punya uang²⁾.

Hal lain yang memprihatinkan adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 1955 (Pemilu pertama di Indonesia pascakemerdekaan) tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya mencapai 91,4 persen dan angka golput hanya 8,6 persen³⁾. Sedangkan kini, seperti yang dipaparkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 ini “hanya” berkisar pada angka 75,11 persen⁴⁾. Pertumbuhan golongan putih yang melesat jauh dalam Pemilu tahun ini, jika dibandingkan dengan Pemilu pertama Indonesia, memicu anggapan bahwa masyarakat sekarang tidak lebih baik dalam berpolitik, apabila dibandingkan di masa lalu.

Entah apa gerakan yang terjadi pada Indonesia! Tetapi, kedua parameter yang disebutkan sebelumnya, yakni mengenai penegakan HAM dan proses demokrasi telah cukup menggambarkan bahwa Ibu Pertiwi

saat ini benar-benar sedang berduka hati. Wajah Indonesia tidak menjadi lebih baik dari hari ke hari, seakan menerangkan bahwa kita sebagai bangsa dan negara sebenarnya sedang berjalan mundur. Kendala masa lalu tidak kunjung terselesaikan, bahkan banyak kendala baru yang muncul dan berteriak-teriak untuk segera dituntaskan.

Kondisi ini rasanya harus membuat kita kembali kembali berkaca: apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Alangkah lebih baik jika kita mau benar-benar membuka mata terhadap segala masalah yang ada. Kemudian kita mulai bergerak dari diri kita sendiri untuk memperbaiki wajah Indonesia. Satu tindakan kita mungkin dapat mengundang berbagai tindakan lain dari para orang-orang yang dengan gagah mengaku berbangsa Indonesia.

Sudah cukup segala kisah tragis negeri ini akibat ulah orang-orang apatis. Mari bersama-sama kita menjadi manusia yang dewasa untuk mendewasakan Indonesia. Kita sudah lama tertidur karena lupa diri. Solusi yang paling masuk akal adalah membangunkan Indonesia agar lebih dewasa, tidak hanya bisa tidur dan sekedar mebiarkan yang buruk semakin terpuruk.

Lihat wajah Indonesia tidak lebih baik, AYO BANGUN!

¹⁾ Agustina Widiarsi dkk, 'Lubang-lubang Perjalanan Suara', Majalah Berita Mingguan Tempo 4310/5-11 Mei 2014

²⁾ Todung Mulya Lubis, 'Pemilu Pasar Bebas', Majalah Mingguan Tempo 4310/5-11 Mei 2014

³⁾ <http://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 13:05 WIB

⁴⁾ <http://www.merdeka.com/politik/kpu-tingkat-partisipasi-pemilu-2014-capai-7511-persen.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 13:13 WIB

PEMILU PONDASI KEBANGKITAN BANGSA

Dyah Wara & Lery Alif



*In simplest terms, a leader is one who knows where he wants to go,
and gets up, and goes.*

*Dalam bahasa yang paling sederhana, pemimpin adalah orang yang tahu benar
kemana dia ingin pergi, lalu bangkit dan mulai berjalan.*

~ John Erskine~

Pemilihan Umum (Pemilu), di dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam sejarahnya, Pemilu yang berlangsung pertama kali pada tahun 1955 tersebut telah mengalami perkembangan. Semula, Pemilu hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, Pemilu di Indonesia juga mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR.

Pemilu di Indonesia saat ini dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menjamin terjadinya pergantian estafet kepemimpinan negara baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Setiap warga negara berharap bahwa, melalui Pemilu, akan terpilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang benar-benar menjalankan fungsi jabatan dan kewajibannya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang kemudian menentukan corak dan cara pemerintahan yang diselenggarakan. Rakyat yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau

biasa disebut sistem demokrasi perwakilan (*representatif democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar bertindak atas nama rakyat, mereka harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu harus benar-benar dicermati pelaksanaannya karena nantinya akan terpilih seorang pemimpin yang sah dan wakil-wakil yang akan membawa aspirasi rakyat. Karena pemimpin dan wakil-wakil yang terpilih itu telah mendapat legitimasi oleh rakyat, maka kepada merekalah rakyat menyerahkan amanat untuk mengarahkan negara ini untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, penting sekali untuk mengenal apa dan siapa yang kita pilih di dalam Pemilu. Jika kita menjatuhkan pilihan kepada orang yang (menurut kita) tepat, maka tentu saja, apa yang kita harapkan bersama, yakni Indonesia yang lebih baik, akan terwujud.

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita berpartisipasi di dalam Pemilu. Pemilu merupakan titik awal dari kebangkitan bangsa. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin nantinya akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, menjadi Golongan Putih atau Golput bukanlah suatu pilihan yang baik. Setiap warga negara diberikan hak pilih dalam Pemilu yang harus digunakan sebaik-baiknya guna mendukung terpilihnya pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”

Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana rakyat berhak memberikan aspirasinya guna menentukan siapa

pemimpin bangsa ini. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemimpin yang terpilih merupakan perwakilan dari rakyat yang pada intinya bertindak atas nama rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, sosok pemimpin yang tulus pada rakyatnya dan tulus mengabdikan pada bangsa ini guna kepentingan seluruh rakyat sangat diharapkan muncul untuk memajukan bangsa Indonesia.

Siapa pun tentu saja berhak mencalonkan dirinya sebagai pemimpin bangsa di dalam Pemilu, bahkan di beberapa tempat di Indonesia, kaum-kaum seperti tukang es, sopir angkot, dan pihak lainnya yang dapat dikatakan dari kalangan rakyat biasa, turut serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Bermodalkan keyakinan mereka untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia, mereka yakin untuk maju menjadi anggota legislatif dan bersaing dengan petinggi-petinggi lainnya. Hal ini tentu tidak salah, karena berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU HAM, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal itu menunjukkan bahwa siapa pun berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin bangsa ini, baik dari golongan petinggi negara maupun dari rakyat biasa. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka benar-benar berkualitas untuk menjadi pemimpin? Apakah mereka benar-benar tulus ingin mengabdikan pada bangsa ini?

Mendaftarkan diri menjadi calon pemimpin dan ikut serta dalam Pemilu merupakan hal yang mudah. Sebaliknya, untuk benar-benar menjadi calon pemimpin yang berkualitas dan tulus mengabdikan bagi bangsa ini tentu merupakan hal yang sulit. Dapat dilihat dalam realita yang ada, banyak pihak-pihak yang mencalonkan diri hanya sekedar

mengumbar janji-janji manis melalui visi dan misi mereka yang pada akhirnya hanya “nol besar” dalam praktik. Mereka lebih fokus terhadap karier pribadi dan tidak benar-benar mengabdikan untuk rakyat. Pemilu hanya dijadikan sebagai ajang rivalitas bagi partai-partai politik untuk memperoleh kedudukan dalam pemerintahan. Tentu bukan hal seperti itu yang dapat memajukan bangsa ini, karena prinsip kedaulatan rakyat yang kita anut menuntut adanya kekuasaan pemimpin yang dari, oleh, dan untuk rakyat.

Plato menyatakan bahwa demokrasi hanyalah dunia ide dan bukan dunia nyata karena ada perbedaan yang mendalam dari *das sollen* dan *das sein*. Sebenarnya, Pemilu merupakan wujud termudah dari demokrasi meskipun dalam praktik tetaplah sulit untuk benar-benar diwujudkan. Berpartisipasi dengan menyumbangkan suara memang hal yang mudah, karena negara sudah memfasilitasinya melalui pelaksanaan Pemilu sebagai penerapan prinsip demokrasi, demi terlaksananya kedaulatan rakyat. Tetapi, untuk benar-benar mempertimbangkan pemimpin yang berkompeten untuk memajukan bangsa ini adalah hal yang sulit.

Jimly Asshiddiqie merumuskan 4 tujuan penyelenggaraan Pemilu, yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan utama diselenggarakannya Pemilu adalah pemberian kesempatan bagi seluruh warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara tertib, guna memajukan bangsa ini sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kesuksesan pelaksanaan Pemilu disertai dengan kandidat pemimpin yang berkompeten sangat menentukan arah masa depan bangsa. Pemilu tidak hanya dilaksanakan untuk

memilih perwakilan legislatif saja, namun juga untuk memilih pemimpin secara eksekutif. Kesalahan pemilihan pemimpin tentu akan berakibat fatal bagi masa depan bangsa ini. Pemilu merupakan dasar pondasi berjalannya bangsa ini di kemudian hari. Terpilihnya pemimpin yang inkompeten tentu akan membawa bangsa ini semakin terpuruk, dan sebaliknya, terpilihnya pemimpin yang benar-benar berkompeten serta benar-benar mengabdikan pada rakyat tentu akan membawa kebangkitan bangsa ini ke arah yang lebih baik; membawa bangsa ini bangun dari keterpurukan serta membangunkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih kuat dan maju.

Pemilu tidak saja penting bagi warga negara dan partai politik, tetapi juga bagi pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sementara itu, bagi masyarakat Pemilu

merupakan momen paling tepat untuk memilih pemimpin yang benar-benar kompeten memajukan bangsa ini, sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Demikian juga semua kandidat yang mencalonkan diri mereka menjadi wakil rakyat baik legislatif maupun eksekutif, hendaknya setelah terpilih mereka memegang teguh prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu bukanlah hal yang sepele. Pemilu merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi titik awal, dasar, dan pondasi dimulainya langkah untuk memajukan bangsa ini. Partisipasi rakyat dalam Pemilu yang maksimal serta diperolehnya pemimpin yang kompeten melalui Pemilu merupakan langkah emas kebangkitan bangsa kita. Dengan kata lain, kesuksesan pelaksanaan Pemilu yang menghasilkan terpilihnya pemimpin yang kompeten adalah kunci bagi kebangkitan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Pesta demokrasi tahun ini bisa jadi akan mengancam independensi pers! Pasalnya, berbagai media massa baik elektronik maupun cetak dimiliki oleh sejumlah elite partai politik tertentu. Media tersebut kemudian mengarahkan lajunya kepada kepentingan pemilik beserta afiliasi politiknya. Media-media tersebut, misalnya Metro TV dan harian Media Indonesia milik Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) serta TV One yang merupakan milik Abuzial Bakrie dari Partai Golongan Karya (Golkar). Selain itu terdapat juga RCTI, Global TV, MNCTV, Trijaya FM dan media cetak Seputar Indonesia milik Hary Tanoesoedibjo dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), sebelum akhirnya “membelot” ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Intervensi pemilik media menurut Rahayu, S.I.P, M.Si, M.A, akademisi dari jurusan Ilmu Komunikasi UGM, dapat terjadi karena motif ekonomi dan motif politik. Motif ekonomi dapat dilihat dari pemberitaan RCTI mengenai kinerja Adam Air. Sebelum Hary Tanoe membeli Adam Air, media ini sering mengatakan betapa buruk kinerja Adam Air. Kemudian pemberitaan buruk tersebut berkurang bahkan menghilang sejak Hary Tanoe menyebut Adam Air sebagai *sister company* MNC Group sehingga tak seharusnya dipojokkan terus menerus. Serupa dengan yang terjadi di ANTV dan TVONE terkait pemberitaannya mengenai Lumpur Lapindo.

Sementara motif politik mewujud ke dalam 2 hal, yaitu berupa pemberitaan yang tendensius terhadap pemilik dan juga iklan. Terdapat beberapa pola pemberitaan yang menunjukkan motif politik pemilik tersebut. Pertama, membuat citra pemilik dan afiliasi politik sebagai yang paling tahu tentang sosok atau kriteria pemimpin Indonesia. Contohnya pidato Surya Paloh yang sempat ditampilkan Metro TV pada suatu kesempatan. Kedua, digambarkan bahwa tingkat kepopuleran dan elektabilitas pemilik dan afiliasi politiknya yang semakin meningkat. Ketiga, pemilik media dan afiliasi politik digambarkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan bangsa. Contohnya

Mengembalikan P

Sisca Riani, Hanifah P

“Kemerdekaan pers bisa terpuruk ke dalam tangan pers hanya menjadi re

– A.J.L

pemberitaan di Buletin Indonesia Pagi di Global TV pada tanggal 11 Oktober 2013 yang mengekspose bakti sosial yang dilakukan Hary Tanoe. Terakhir, anggota legislatif dari partai pemilik media digambarkan kritis dalam melihat persoalan bangsa, misalnya berita di MNC group mengenai suatu kasus jauh lebih banyak mewawancarai anggota legislative dari partai Hanura dibandingkan anggota legislatif partai lain. Penelitian yang dilakukan oleh P R 2 M E D I A bekerjasama dengan

Yayasan Tifa menemukan bahwa dari 56 berita politik yang menjadi sampel, 19 berita (33,9%) menampilkan berita berorientasi positif terhadap pemilik media dan kroni-kroni politiknya¹⁾.

Penggunaan iklan sebagai sarana kampanye memang legal di negara yang menganut prinsip demokrasi. Namun yang



ers kepada Rakyat

ebriani, Christy Ullisa

an para pemilik media dan urusan kemerdekaan
alitas finansial semata”

iebling



n yang seharusnya digunakan untuk memperkenalkan keberadaan, visi, dan misi partai politik justru disalahgunakan oleh pemilik media. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah menayangkan iklan tidak sesuai peraturan yang berlaku dan menggunakan iklan tersebut untuk memberi citra negatif terhadap rival politik pemilik media. Misalnya saja pada 21 Maret 2014, Partai Hanura menampilkan 14 spot iklan di RCTI, 12 spot di MNC TV dan 16 spot di Global T V. G o l k a r menampilkan 13 spot iklan di TV One dan

15 spot di ANTV. Partai Nasdem sebanyak 15 spot di Metro TV. Demokrat di SCTV sebanyak 20 spot dan di Indosiar sebanyak 16 spotⁱⁱⁱ⁾. Hal ini bertentangan dengan Pasal 97 UU Nomor 8 Tahun 2012 (UU Pemilu Legislatif) yang memberi batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi sebanyak 10

terj
adi,
ikla

(sepuluh) spot paling lama 30 (tiga puluh) detik sementara di radio paling lama 60 (enam puluh) detik setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.

Independensi Pers versus Pers Bertendensi

Dalam wawancara Kamis (3/4), Rahayu menegaskan, “Tentu saja keberpihakan pada pemilik media ini tidak etis. Media elektronik bekerja dengan publik domain, publik domain itu frekuensi dan frekuensi itu milik publik. Apabila frekuensi dikelola oleh pemodal, pemodal ini pinjam kepada negara sehingga konsekuensinya harus mempergunakan media untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apabila dieksploitasi untuk kepentingan pemilik maka tentu saja tidak etis dan melanggar hukum.”

Demikian juga dengan media cetak, lanjut Rahayu, apabila media ini tergolong partisan maka sudah seharusnya dideklarasikan sejak awal sebagai partisan dengan partai ataupun lembaga apa. Namun apabila media cetak tersebut berorientasi pasar maka haruslah independen, objektif dan berpihak pada publik.

Tidak dapat dipungkiri, di era global saat ini media memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk opini publik. Sudah bukan zamannya menganggap media hanya sebagai sarana penyampaian berita. Pada masa Pemilu seperti sekarang, campur tangan media begitu besar manakala hal tersebut berkaitan dengan kemasan pencitraan. Upaya pencitraan bisa mengarah menjadi berita yang tidak berimbang. Bisa jadi hanya menampilkan segi positif atau negatifnya saja.

Ditemui di tempat berbeda, Okto Lampito, selaku Pimpinan Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat, terkait fenomena condongnya media kepada salah satu figur menanggapi, “Saya bisa memahami tetapi sebenarnya tidak diperbolehkan. Harusnya meletakkan media itu agar dapat berdiri sendiri. Independen. Kalau sudah berlebihan berarti visi media tersebut parah. Perlu ditelaah lebih lanjut sejauh mana visi media tersebut dipertahankan.”

Hal lain yang memperparah kondisi sekarang adalah terkadang media menjadi “alat”

10



politik. Pemberitaan menjadi tidak berimbang. Pemberitaan yang tendensius, selain dilakukan dengan memberikan citra yang baik terhadap pemilik media, dapat juga berupa penggambaran yang negatif terhadap rival politik dari sang pemilik media. Dapat diambil contoh pemberitaan Global TV pada 9 Oktober 2013, yang mengangkat Dahlan Iskan yang dilaporkan polisi oleh Jaringan Advokat Publik karena penyalahgunaan uang negara sebanyak Rp 37,6 trilliun, namun tidak disertakan pernyataan dari pihak Dahlan Iskan sendiri, sehingga berita tersebut terkesan tidak berimbang.

Terkait hal itu, Okto menjelaskan, “Kalau faktanya memang seperti itu, tidak apa-apa. Akan tetapi yang sering terjadi justru tidak *related* ke permasalahannya. Dalam beberapa kejadian, hal yang tidak ada sangkut-pautnya dibesar-besarkan untuk berita.”

Padahal, terang Okto, media yang menampilkan *ekspose* yang berlebihan justru akan mengurangi kredibilitasnya di mata masyarakat. Masyarakat sendiri mulai bisa memilah mana yang murni berita atau iklan politik yang dikemas dalam berita. Kasus seperti ini terutama terjadi di dunia pertelevisian. Media yang masih tergolong cukup independen adalah media cetak, Media cetak jumlahnya banyak dan pembacanya lebih memilih. Kalau tidak hati-hati jelas akan kehilangan pembacanya.

Mengembalikan Esensi Pers

Pers sebenarnya bertanggungjawab pada publik, bukan kepada penguasa atau elite politik tertentu. Pers hidup dari dan untuk publik.

Publiklah yang seharusnya menjadi titik tumpu dalam menyajikan sebuah berita. Hal ini yang terkadang ditinggalkan, publik justru menjadi yang nomor dua.

Perlu digarisbawahi bahwa keberpihakan pers tidak sepenuhnya salah. Keberpihakan seharusnya diarahkan untuk melindungi kepentingan yang lemah. Sebagai contoh kasus Prita atau kasus Cicak vs Buaya beberapa tahun silam. Kedua kasus itu terangkat semata-mata berkat peran media. Dalam kasus itu media memperlihatkan keberpihakannya: jelas untuk mengangkat isu ketidakadilan. Pada hal tertentu, jurnalis tentu harus sigap dalam menentukan sikap. Porsi keberpihakan pun tidak boleh berlebihan, sepanjang yang diperlukan saja.

Dalam wawancara Jumat (28/3), Okto menambahkan, “Yang harus diingat, inti dari jurnalisme adalah konfirmasi. Biasanya yang terjadi adalah *bad news is good news*. Seharusnya *bad news* tetap *bad news*, *good news* tetap *good news*. Sudah saatnya kembali pada hakikat pers yaitu memaparkan fakta dan memberikan jalan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pilihannya.”

Tidak Ada Pengaruh

Khalayak umum sendiri seperti tidak terpengaruh dengan sikap media seperti itu, Dyah Wara, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, menyadari fenomena ini. Akan tetapi dia tidak merasa terganggu ataupun terpengaruh. Menurutnyanya itu tidak membawa pengaruh besar. Pengaruhnya hanya menjadi mengenal bahwa mereka yang ada di TV itu akan mencalonkan diri. Sehingga masyarakat menjadi lebih tahu.

Dyah, sapaan akrabnya, justru lebih memilih untuk mengabaikannya, apabila dirasa ada tayangan di media massa yang menyiarkan berita politik yang berbau kampanye politik. Tetapi ia juga tidak memungkiri perlunya media dalam hal memperkenalkan calon-calon sehingga masyarakat menjadi tahu rekam jejak calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Harapannya, stasiun TV dapat bersikap lebih netral, karena televisi merupakan konsumsi

publik yang memiliki peran besar dalam mendidik dan mengembangkan bangsa.

Senada dengan Dyah, Siska Giofanna Mapusa, mahasiswa FH UGM angkatan 2011, juga menyadari dan tidak merasakan pengaruhnya. Siska menambahkan bahwa harusnya yang diketahui oleh masyarakat adalah penyampaian *track record* dan *achievement* dari masing-masing calon atau kandidat pemimpin bangsa tersebut. Maka televisi, melalui pemerataan secara holistik tentang eksposisi semua calon tersebut bukan hanya menunjuk pada suatu calon atau pasangan calon tertentu.

Berita diperlukan karena berkaitan dengan kepentingan demokrasi dari masyarakat Indonesia. Perkembangan gejala demokrasi di Indonesia sendiri salah satunya adalah Pemilu. Pemilu juga tidak bisa lepas dari kewajiban pers pasca kebebasan pers yang diberikan oleh negara melalui pengaturan normatif yang ada. Pers memberitakan informasi yang detil, aktual dan dibutuhkan masyarakat. Namun harus diperhatikan mengenai akurasi dan relevansinya. Hal-hal yang berkaitan pada kepentingan politis tertentu seharusnya tidak usah diberitakan.



Sebagai contohnya, ketika media tertentu menonjolkan berita yang sebenarnya tidak bersifat general dan mengkhususkan figur atau kelompok tertentu demi kepentingan khusus yang sifatnya berlebihan dan tidak relevan.

Masih menurut Siska, masyarakat sendiri secara internal harusnya memiliki pemahaman yang cukup terhadap para calon yang tersebut. Jangan sampai hanya membeli kucing dalam karung. Harus ada pemahaman tentang pemimpinnya dari segi *knowledge*, kompetensi yang dimiliki, dan titik pencapaian yang diharapkan oleh bangsa yang sekiranya dapat diampu oleh calon pemimpin tersebut.

i) Puji Rianto, dkk. *Kepemilikan dan Intervensi Siaran* (Yogyakarta : PR2media, 2014) hlm 169

ii) " 8 Stasiun TV Langgar Aturan Iklan Kampanye" diakses dari <http://www.suarapembaharuan.com> / pada tanggal 21 April 2014 pukul 14:43

MENAKAR MASA LALU UNTUK MENATAP MASA DEPAN

Oleh Moses Ompusunggu

“Tanpa diampuni terbebas dari konsekuensi-konsekuensi perbuatan yang telah kita lakukan, kapasitas kita untuk bertindak, bagaimanapun, akan terbatas oleh satu-satunya perbuatan, yang dari perbuatan itu kita tidak pernah pulih; kita akan tetap menjadi korban dari konsekuensi-konsekuensi itu untuk selamanya.”

(Hannah Arendt, *The Human Condition*, 1958).

13

Tidak salah jika mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara (juga bangsa) mengalami proses lahir kembali, seiring dengan runtuhnya pemerintahan rezim Orde Baru sebagai pintu masuk era reformasi. Indonesia yang lahir baru adalah Indonesia yang memulai dari nol lagi kehidupan berbangsa dan benegaranya, untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh tuntutan gerakan reformasi 1998. Terkait standar tersebut, yang dapat dijadikan acuan adalah substansi salah satu produk hukum penting yang dibuat pascareformasi, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan di era reformasi, baik oleh pemerintah maupun warga negara. Mengutip bagian Latar Belakang dari Tap MPR, penegakan HAM termasuk ke dalam enam poin penting tujuan reformasi, yaitu “untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”

Khusus untuk melapangkan jalan bagi penegakan HAM di Indonesia, Tap MPR juga mengamanatkan pembentukan Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional dalam hal usaha pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM di masa lalu dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Komisi tersebut kemudian terbentuk dengan nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), meskipun akhirnya keberadaannya hanya seumur jagung, dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam perkembangannya kemudian melakukan penyelidikan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum ditindaklanjuti. Dalam sebuah rilisan yang dikeluarkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), penyelidikan tersebut meruncing pada enam kasus, yakni Peristiwa Trisakti Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), Peristiwa Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa 1965, dan Peristiwa Penembakan Misterius. Komnas HAM kemudian menyimpulkan dua butir rekomendasi, yaitu ada dugaan pelanggaran HAM yang berat dan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dalam keenam kasus tersebut. Penyelesaian kasus-kasus tersebut kemudian menemui jalan buntu kenasampai saat ini belum pernah terbentuk forum Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana direkomendasikan oleh Komnas HAM.

Perkembangan Penuntasan Kasus Kasus Pelanggaran Berat HAM di Masa Lalu

No	Perkara	Rekomendasi Komnas HAM	Status
1	Peristiwa Trisakti, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999)	1) Ada dugaan Pelanggaran berat HAM. 2) Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.	1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada April 2002. 2) Pada tahun 2008 Jaksa Agung menyatakan tidak dapat melanjutkan penyidikan karena sudah ada pengadilan militer dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. 3) Menurut Komnas HAM, Pengadilan HAM ad hoc tetap dibutuhkan.
2	Peristiwa Mei 1998	1) Ada dugaan pelanggaran berat HAM. 2) Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.	1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada September 2003. 2) Terjadi beberapa kali pengembalian berkas ke Komnas HAM. 3) Pada tahun 2008, Jaksa Agung menunggu adanya pengadilan HAM ad hoc. 4) Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya.
3	Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998	1) Ada dugaan pelanggaran berat HAM. 2) Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.	1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikannya pada September 2003. 2) Terjadi beberapa kali pengembalian berkas penyelidikan ke Komnas HAM. 3) Pada tahun 2008 Jaksa Agung menyatakan menunggu adanya Pengadilan HAM ad hoc. 4) Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya. 5) Pada September 2009 DPR merekomendasikan: a) pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, b) pencarian korban yang masih hilang, c) pemulihan kepada korban dan keluarganya, d) ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. 6) Belum ada satupun rekomendasi yang dilaksanakan Presiden. 7) Jaksa Agung belum menindaklanjuti lagi penyelidikan Komnas HAM.
4	Peristiwa Talangsari 1989	1) Ada dugaan pelanggaran berat HAM. 2) Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.	1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada Oktober 2008. 2) Jaksa Agung masih meneliti berkas penyelidikan dari Komnas HAM.
5	Peristiwa 1965	1) Ada dugaan Pelanggaran berat HAM. 2) Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, atau	1) Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012. 2) Di bulan yang sama Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mempelajari penyelidikan tersebut, dan akan melakukan konsultasi dengan DPR, DPD, MPR, MA. 3) Pada Agustus 2012 Kejaksaan Agung melakukan gelar

		Penyelesaian melalui KKR.	perkara, tetapi belum ada perkembangan dari gelar perkara tersebut. 4) Komnas HAM diminta melengkapi hasil penyelidikan. 5) Belum ada perkembangan selanjutnya.
6	Peristiwa Penembakan Misterius	1) Ada dugaan Pelanggaran berat HAM. 2) Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.	1) Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012. 2) Belum ada sikap dari Jaksa Agung.

Sumber: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Baskara T Wardaya, sejarawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menjelaskan bahwa sejatinya semua kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu harus dituntaskan. “Sebagai bangsa yang katanya religius, kita sudah seharusnya menghormati manusia lain, untuk itu kehidupan satu orang manusia saja sangat berharga. Jika kita masih mempercayai kemanusiaan, yang namanya penuntasan kasus-kasus di masa lalu itu tidak dibatasi.” Akan tetapi pria yang pernah mendapat beasiswa Fulbright untuk melakukan penelitian post-doktoralnya di Amerika Serikat tersebut mengingatkan bahwa upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu harus realistis. Menurutnya, yang harus diprioritaskan adalah pembunuhan massal pasca peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) yang terjadi pada tahun 1965 karena pertama, pembunuhan massal bukan hanya pembunuhan semata, tetapi terkait tentang berubahnya orientasi bernegara; Indonesia pra 1965 berbeda sekali dengan Indonesia pasca 1965. Kedua, dalam sejarahnya, bahkan sejak era kolonialisme, tidak pernah terjadi pembunuhan yang semasif pembunuhan massal pasca 1965. Ketiga, pembunuhan massal yang berkaitan dengan peristiwa G-30-S bukan hanya urusan dalam negeri Indonesia saja, tersangkut pula kepentingan luar negeri di dalamnya.

Rekonsiliasi sebagai Penakar Utama

“Rekonsiliasi itu”, ujar Guntur Narwaya, Peneliti HAM pada Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), “sederhananya adalah upaya pengungkapan fakta. Arahnya

menuju kebenaran.” Dalam hal upaya pengungkapan tersebut, yang paling penting adalah adanya keberanian untuk mengungkap kebenaran. “Realitas politik dan konsensus nasional itu nomor dua”, tegas Guntur yang juga penulis buku “Kuasa Stigma dan Represi Ingatan” itu. Namun sesungguhnya selain sebagai upaya pengungkapan fakta yang mengandung nilai kebenaran, beberapa hal dalam TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dapat menjadi dasar untuk menggerakkan proses rekonsiliasi sebagai upaya menakar pelanggaran berat HAM di masa lalu yang terjadi di Indonesia.

Pertama, rekonsiliasi menjadi penting sebagai perwujudan semangat reformasi Indonesia yang terlepas dari kekuasaan pemerintah pasca reformasi, yang dalam TAP MPR disebut sebagai pemerintahan yang otoriter, sentralistik, marak praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan menyalahgunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI) sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan. Kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan proses rekonsiliasi, yakni persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Ketiga, dalam hal eksekusinya diperlukan berbagai kondisi yang dapat melancarkan proses rekonsiliasi, TAP MPR menyebut dua belas kondisi yang dapat memantapkan rekonsiliasi menuju tujuan yang disebutkan sebelumnya. Keempat, adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan pelaksanaan rekonsiliasi, yang dalam TAP MPR disebutkan dua belas tujuan yang menjadi arah kebijakan tersebut. Kelima, yang paling penting,

upaya rekonsiliasi itu, berdasarkan TAP MPR, diwujudkan melalui sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Dari hal-hal tersebut dapat dimaknai bahwa rekonsiliasi tidak melulu sebagai jalan pengungkapan fakta kebenaran; rekonsiliasi memiliki pengaruh yang luas, berdampak kepada banyak aspek berbangsa dan bernegara Indonesia, yang pada akhirnya bertujuan sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni persatuan dan kesatuan Indonesia yang mantap.

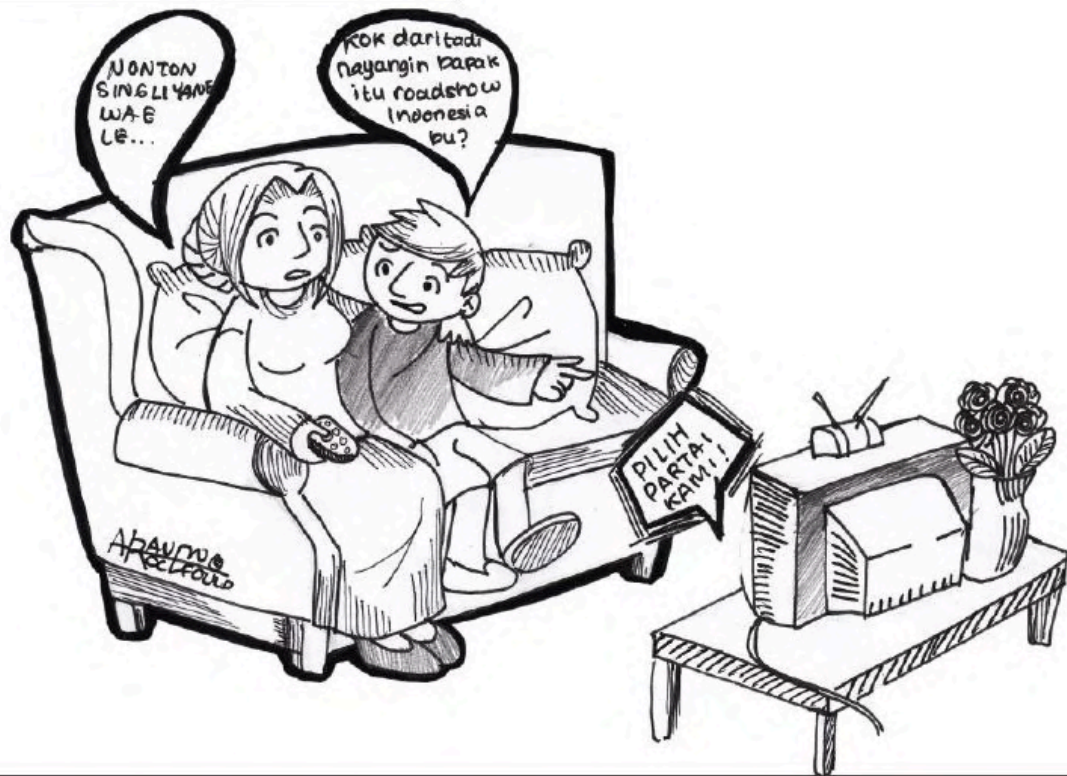
Pengadilan HAM: Layu Tanpa Pernah Benar-Benar Mekar

Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM), berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM), dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM, sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU Pengadilan HAM membatasi pelanggaran berat HAM kepada dua hal, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM diatur bahwa setiap korban dan saksi pelanggaran berat HAM dan/atau ahli warisnya berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa sifat Pengadilan HAM di Indonesia mengakomodasi kepentingan korban dan saksi pelanggaran berat HAM dan/atau ahli warisnya. Berbeda dengan ragam jenis pengadilan atas nama kemanusiaan di berbagai negara, yang tidak melihat korban sebagai pihak yang wajib diakomodasi kebutuhannya. Sebagai contoh adalah pengadilan “rakyat” yang terjadi di Rumania atas Nicolae Ceausescu dan keluarga serta pengadilan “pemenang” terhadap pimpinan NAZI Jerman dan militer Jepang pasca kekalahan mereka di Perang Dunia II (yang dikenal dengan istilah Nuremberg Trial dan

Tokyo Trial). Pengadilan “rakyat” di Rumania mudah dimanipulasi oleh elite politik pemerintah transisi pasca Ceausescu; pengadilan “pemenang” di Nuremberg dan Tokyo benar-benar hanya memuaskan kepentingan si pemenang (Amerika Serikat dan sekutunya) tanpa pernah benar-benar memperhatikan nasib ratusan juta orang yang terpisah dari kampung halamannya, jutaan korban tewas, korban luka, maupun mereka yang menderita trauma pascaperang. Nuremberg Trial maupun Tokyo Trial tidak berarti sama sekali bagi masyarakat di Eropa dan Asia dalam masa setelah Perang Dunia II.

Harapan yang diusungkan kepada Pengadilan HAM di Indonesia tidak berarti memuluskan pelaksanaannya. Stagnasi yang dialami Pengadilan HAM; seperti yang dijelaskan di awal tulisan; memupus asa banyak korban pelanggaran berat HAM di masa lalu atau keturunannya. Praktek kekerasan dan stigmatisasi justru semakin banal. Pada 23 Oktober 2013 silam, acara silaturahmi keluarga korban 1965 di Yogyakarta diserang dan dibubarkan secara paksa oleh suatu kelompok yang menamakan diri sebagai Forum Anti Komunis Indonesia (FAKI). Tidak adanya kelanjutan berarti dari pelaksanaan Pengadilan HAM, khususnya untuk kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, ditambah dengan belum adanya lagi wacana serius untuk menghidupkan kembali KKR menjadi sebuah kekhawatiran yang perlu diseriisi. Harapan agar terbentuknya keadaan baru sesuai dengan kebutuhan para korban pelanggaran HAM berat maupun keturunannya bisa menjadi pijakan penting bagi proses perkembangan Indonesia; melihat masa depan dengan menakar masa lalu secara tepat, seperti ditegaskan oleh Guntur Narwaya, bahwa “Rekonsiliasi bisa menjadi pilar bangsa. Negara jika dibangun dalam situasi yang rapuh, segala proses ke depannya juga akan rapuh.”



Kata Massa tentang Media

Hanindito Danusatya & Dayinta Agni

17

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada hakikatnya adalah sebuah ajang besar dimana seluruh rakyat Indonesia (tentu yang secara sah telah memperoleh hak pilih) berpartisipasi di dalamnya. Bisa dikatakan sebagai suatu keharusan tersendiri bagi rakyat Indonesia untuk turut serta meramaikan Pemilu setiap kali dihelat. Gelaran tahun ini adalah kali ke-11 Pemilu diselenggarakan di negeri ini. Pemilu digembar-gemborkan sebagai pesta besar yang disiapkan dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Dengan warna yang berbeda satu sama lain, pesta rakyat ini digelar tiap lima tahun sekali secara rutin sejak 1955 silam, dan di tahun 2014 ini warna yang memancar pastinya memiliki kekhasan yang lain daripada pesta-pesta sebelumnya.

Di dalam pesta akbar tahun ini, manuver-manuver mereka yang berlomba telah nampak dari satu atau dua tahun sebelum ajang besar ini dimulai. Hal yang mencolok dari

manuver para petarung tahun ini adalah digunakannya media sebagai corong eksistensi, dan jendela pencitraan dari para gladiator Pemilu. Ada yang geliatnya nampak halus; ada pula yang jelas sekali mempertunjukkan "kemesraan" dengan media. Namun, efektifkah media sebagai senjata dalam ajang pertarungan besar menjadi kaum elit pada Pemilu tahun ini?

Untuk menjawab pertanyaan itu, dalam Parameter kali ini Mahkamah melakukan serangkaian survei untuk mencari tahu buah pikir dari kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang pada dasarnya punya andil pula dalam ajang besar tahun ini. Untuk itu, Mahkamah menyebar kuisioner dalam survei ini kepada 100 responden yang semuanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM. bertujuan untuk mencari tahu seberapa ampuh media bagi para pemilih yang menjadi objek dari pertarungan ini, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum UGM.

Untuk merangkai jawaban tersebut, dari

survei yang kami lakukan, diketahui bahwa sebanyak 50% responden lebih sering menggunakan jejaring sosial dalam hal mengakses informasi. Sebanyak 25% dari responden memilih mengakses informasi melalui situs-situs internet dan 20% lain melalui televisi. Kemudian sebanyak 4% responden mengonsumsi informasi dari surat kabar atau majalah dan 1% memilih berinteraksi lewat media lain. Teknologi yang terus berkembang memang menjadikan informasi hadir dalam genggaman setiap penggunanya, dan jejaring sosial yang hari ini beragam jenisnya tentu saja digandrungi berbagai kalangan mulai dari muda-mudi hingga mereka yang sudah berumur. Bahkan di berbagai negara, jejaring sosial yang bentuknya berbagai macam tersebut telah digunakan secara aktif oleh para pesohor yang tak jarang juga merupakan pembesar negara atau keluarganya. Cukup menarik pula ketika media digunakan oleh 56% mahasiswa dalam rangka mencari informasi dan 43% lainnya menggunakan media untuk mengakses hiburan. Hal ini mungkin yang menyebabkan elite politik di Indonesia tertarik mengintervensi media yang masih menjadi sarana pencarian informasi dari para penggunanya. Para elite politik ini dapat dengan leluasa merekayasa konten penyedia informasi demi mendapat perolehan suara yang tinggi dalam pemilu.

Menilai perkembangan media di Indonesia hari ini, hanya 19% responden menyatakan media berkembang sesuai dengan fungsinya, terutama media hari ini yang memberikan kesempatan pada masyarakat dalam memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Kemudian 40% responden menilai media saat ini dalam kekuasaan oknum-oknum tertentu, responden mengamati adanya kepemilikan media massa oleh politisi seperti Aburizal Bakrie, Harry Tanoe, dan Surya Paloh serta penggunaan frekuensi publik untuk *black campaign*. 41% lainnya menilai media berkembang terlalu bebas hari ini. Beberapa responden berpendapat terlalu bebasnya media dapat dilihat dari menjamurnya konten-konten negatif yang justru menjadi konsumsi para

pengguna media termasuk anak-anak dibawah umur.

Media yang difungsikan sebagai senjata para pemilik media yang juga merupakan peserta dalam pemilu dinilai sebagai suatu kewajaran oleh sebanyak 74% responden dengan catatan ada batasan tertentu dan tidak berlebihan. Sementara 26% lainnya menilai hal ini tidak pantas. Ketika informasi yang hadir tak lagi objektif atau cenderung mengarahkan masyarakat tentu menjadikan informasi ini datang dengan perspektif tersendiri saat melihatnya. Namun perilaku media yang demikian, oleh beberapa responden, dilihat sebagai sesuatu yang sah meskipun memang tidak pantas.

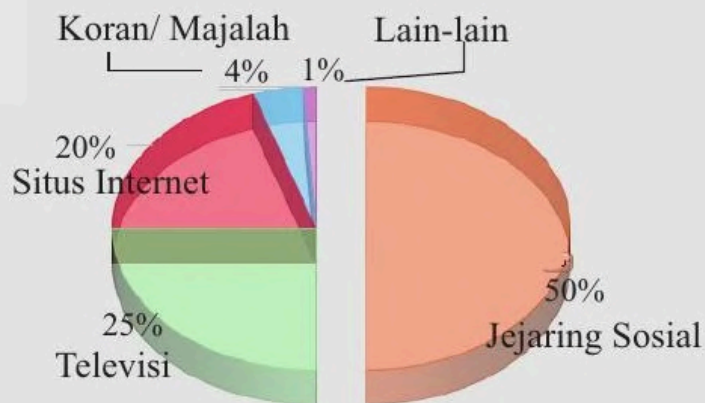
Tentunya survei di atas berkaitan dengan penilaian responden pada penyetiran media yang ditunggangi para peserta pemilu hari ini. Hanya 7% responden yang menyatakan bahwa media hari ini tidak ada kaitannya dengan para penunggangnya sementara 93% lainnya merasa secara nyata media hari ini arahnya telah diatur oleh para penunggangnya. Hal ini dinilai beberapa responden cenderung disalahgunakan karena informasi yang disampaikan sebagai hakikat dari media itu sendiri justru menyudutkan pihak-pihak tertentu, informasi yang disampaikan tak lagi netral karena cenderung mengarahkan para konsumennya pada kesimpulan tertentu, dan yang cukup menarik dan perlu kita perhatikan adalah menurunnya objektivitas media dalam hal penyampaian informasi. Media tak lagi dapat dijadikan masyarakat sebagai saran pencarian informasi yang terpercaya yang tergambar pada pertanyaan terakhir dalam kuisisioner yang kami edarkan. Nilai tertinggi responden untuk kepercayaan pada media masa kini hanya mencapai nilai 8 dari sepuluh. Itupun hanya 5% dari responden yang memberi angka 8 untuk taraf kepercayaan mereka, dan mayoritas responden yaitu sebanyak 28% responden memberi nilai 5 untuk taraf kepercayaan mereka pada media.

Ketidakpercayaan responden terhadap media jelas merupakan kesimpulan dari sekian

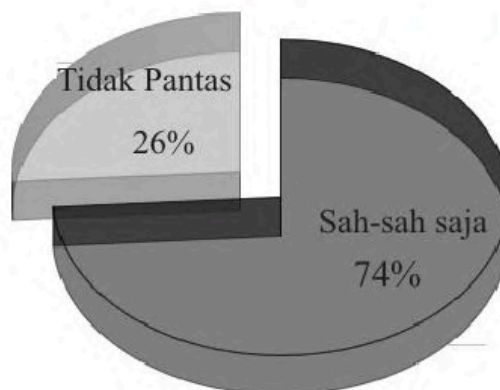
pertanyaan yang telah kami ajukan, bahwa media seperti yang disampaikan diatas tak lagi hadir sebagai pembawa informasi yang jujur, justru hadir dengan informasi yang datang dari sisi pemilik medianya. Ketidakpercayaan yang didasarkan pada kejelian pengamatan responden akan berbagai sudut pemberitaan dari satu informasi yang hadir hari ini tentunya akan

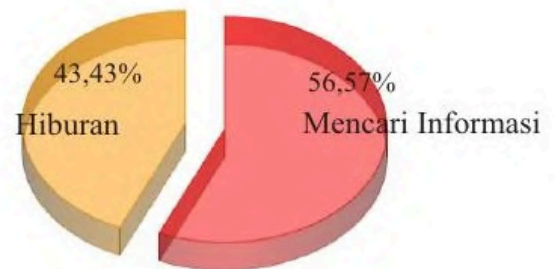
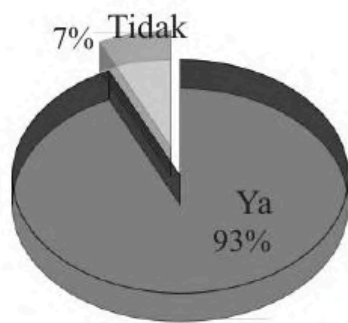
mematahkan harapan para pemilik media yang juga petarung politik pada media sebagai saran corong eksistensi mereka, yang mereka belokkan dari hakikat media sebagai jendela informasi, sehingga menjawab pertanyaan yang kami lemparkan diatas, media dengan pecut kendali diatasnya ini bukanlah sarana efektif dalam ajang pesta demokrasi akbar tahun ini.

Jenis Media yang digunakan

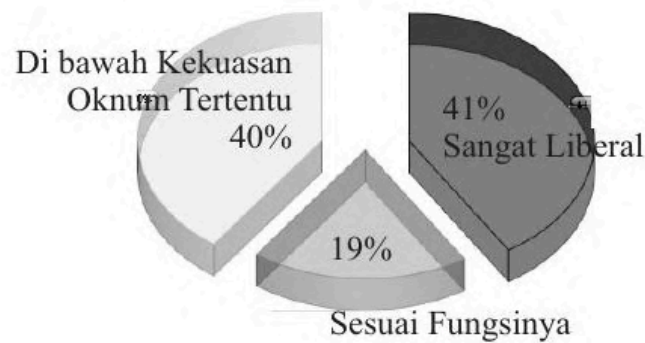


Bagaimana Pandangan Anda Mengenai Media Massa sebagai Sarana Kampanye

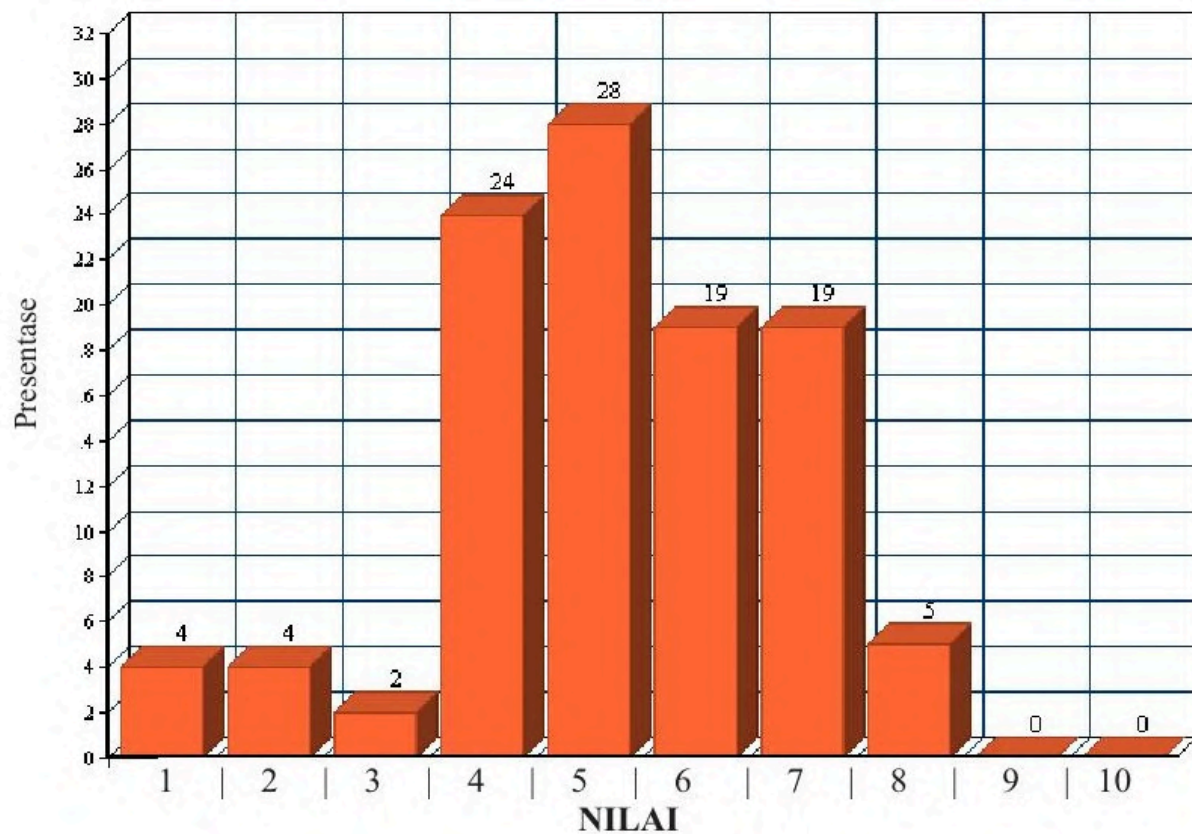




Perkembangan Media di Indonesia yang Anda Ketahui



Kepercayaan terhadap media/ pers di Indonesia



Sosialisai Sanksi Akademik Masih Sekedar Wacana

Agnes Sulistya & Sekar Banjaran Aji



Pada awal Semester Genap 2013-2014 beredar berita kurang sedap di kalangan kampus bahwa beberapa mahasiswa dijatuhi sanksi akademik. Sanksi dijatuhkan setelah melanggar peraturan yang baru saja diterbitkan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Peraturan Rektor. Kabar mengenai penjatuhan sanksi akademik ini diketahui dengan jelas melalui *news screen* yang terdapat di depan Gedung IV. Selain itu, kabar juga tersebar melalui kasak-kusuk yang beredar dari mulut ke mulut di antara mahasiswa, yang temannya menjadi salah satu yang terkena sanksi akademik.

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT mengatur tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan diterbitkan pada 26 Agustus 2013. Pada dasarnya dalam peraturan ini dijelaskan tentang tata perilaku mahasiswa sebagai pribadi dan sebagai warga termasuk warga kampus, masyarakat, maupun warga negara. Selain itu dijelaskan pula kewajiban dan hak-hak mahasiswa.

Dalam peraturan ini, dijelaskan pula tentang sanksi akademik yang akan diterima oleh mahasiswa jika terbukti melakukan pelanggaran seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Rektor. Jenis-jenis sanksinya pun telah

dikategorikan dalam sanksi ringan sampai berat tergantung pelanggaran yang dilakukan. Termasuk dalam kategori pelanggaran yang diancam sanksi ringan sampai sedang antara lain membaca atau mengutip buku dalam ujian tertutup, bekerja sama dengan orang lain selama ujian. Mengeluarkan pendapat ataupun berbuat yang merusak ketentraman universitas, serta mengatasnamakan universitas tanpa persetujuan pimpinan universitas juga termasuk pelanggaran ringan sampai sedang. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran yang diancam dengan sanksi sedang sampai berat antara lain: plagiarisme, melakukan kecurangan akademik seperti menjadi mahasiswa dengan cara yang ilegal, memanipulasi data, memalsukan tanda tangan dalam dokumen dan mengerjakan tugas atau ujian menggantikan orang lain.

Sanksi yang diancamkan dalam Peraturan Rektor ini dari yang paling ringan berupa teguran lisan serta pernyataan permohonan maaf. Adapun yang dimaksud dengan sanksi sedang adalah berupa peringatan tertulis, pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh selama satu semester, hingga skorsing. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi berat adalah pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa.

Tentunya peraturan ini diharapkan

membawa kemajuan yang signifikan. Dengan terbitnya peraturan ini berarti pihak universitas menjunjung tinggi nilai kejujuran yang menjadi semangat pendidikan di Indonesia yang kian hari makin dipertanyakan integritasnya seiring dengan maraknya plagiarisme di kalangan mahasiswa bahkan dosen. Dengan terbitnya peraturan ini pula, berarti bahwa universitas sudah mengambil sikap tegas terhadap plagiarisme dan tindak kecurangan akademik lain seperti “titip absen” atau yang dikenal dengan istilah TA (Titip Absen) hingga joki ujian.

“Aku belum tahu kalau ada SK Rektorat mengenai tata perilaku. Selama ini yang aku tahu juga sekedar peraturan tata tertib saat ujian. Aku berharap ada sosialisasi dari kampus. Jadi kalau kita melanggar terus kena sanksi kita *nggak ngerasa* kampus main hakim sendiri,” ujar Annisa Fitri, mahasiswa FH UGM angkatan 2012.

Senada dengan Annisa, Wahyu Adi MP, Mahasiswa FH UGM angkatan 2012 juga mengatakan, “Aku *nggak* tahu kalau ada SK Rektor yang mengatur masalah *begituan*. Seharusnya ada sosialisasi dari pihak rektorat, ya walaupun kita anak hukum *nggak* tiap hari buka portalnya (*website*) rektorat juga kan?”

Apa yang diungkapkan Anissa dan Wahyu hanyalah segelintir dari ribuan mahasiswa UGM yang merasa bahwa tidak ada usaha sosialisasi yang masif tentang produk peraturan yang dikeluarkan oleh jajaran tertinggi UGM tersebut. Peraturan yang hanya dibiarkan saja tanpa adanya sosialisasi yang baik pada akhirnya akan menjadi aturan yang mandul dan tidak berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Sisi lain sanksi akademik yang diterapkan peraturan ini sudah mulai mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa. Contohnya Regina Martha Parasi Malau, mahasiswa FH UGM angkatan 2012 berpendapat, “Aku tahu masalah sanksi akademik itu soalnya sempat mendengar ada beberapa anak yang diskors. Walaupun aku *nggak* tahu bagaimana aturan itu sebenarnya mengatur mahasiswa. Menurutku aturan sanksi akademik akan efisien tergantung mahasiswanya sendiri, kalau pada dasarnya batu

mau apapun aturannya ya tetap dilanggar. Jadi perlu adanya kesadaran mahasiswa selain sosialisasi peraturan.”

“Jujur saja dulu aku sering TA tapi karena awal semester kemarin baca pengumuman dari akademik ada empat orang yang kena sanksi akademik, sekarang aku takut buat TA. Apalagi ada sebagian dosen sekarang yang absennya dipanggil. Aku sekarang udah *nggak* pernah TA lagi. Serem!”, kata salah satu mahasiswa FH UGM angkatan 2012 yang tidak mau disebutkan namanya.

Demikian banyaknya polemik soal sanksi akademik, peraturan ini tetap harus diapresiasi sebab dapat menjadi semacam tonggak baru dalam pemberantasan kecurangan akademik. Sebab implementasinya sudah mulai terlihat 'menakutkan' meskipun tak dapat dipungkiri bahwa untuk melaksanakan sepenuhnya peraturan ini perlu kerja sama dan usaha yang lebih keras dari semua pihak untuk menegakkan peraturan. Kita semua tetap masih bisa berharap (salah satunya) kepada peraturan ini terutama implementasinya agar semangat kejujuran yang menjadi napas pendidikan di Indonesia dapat ditegakkan di seluruh lapisan terutama kalangan akademisi muda yang dipandang sebagai idealis dan bahan bakar utama kemajuan sebuah bangsa.

TA adalah kepanjangan dari titip absen yaitu suatu perbuatan di mana si mahasiswa meminta tolong temannya untuk mengisikan absensi



Konservatisme Hakim Konstitusi

Elisabet Regitta & Agung Nugroho

23

Di akhir tahun 2013, masyarakat sempat dihebohkan dengan penangkapan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar atas kasus korupsi yang menjeratnya. Huru-hara yang terjadi saat itu sangat berdampak bagi kepercayaan masyarakat terhadap MK. Kinerja MK, yang selama ini menjadi *rising star* dalam penegakan hukum di Indonesia, kemudian menjadi sorotan publik.

Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang digadang-gadang sebagai Perpu penyelamatan MK. Perpu tersebut dikeluarkan dengan dalih adanya kepentingan yang memaksa untuk menyelamatkan MK serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Walaupun diwarnai dengan berbagai kritik dan spekulasi dari berbagai kalangan, namun akhirnya Perpu tersebut disahkan menjadi UU No. 4 tahun 2014. Belum berselang lama setelah diundangkan, UU tersebut diajukan ke MK untuk diuji konstiusionalitasnya terhadap UUD 1945.

Menurut Jenedjri M Gaffar (Koran Sindo Selasa, 18 Februari 2014), ada tiga substansi utama dalam pembatalan UU tersebut yaitu adanya mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang harus melalui panel ahli yang

dibentuk oleh Komisi Yudisial (Pasal 18 huruf b); persyaratan calon hakim konstitusi yang harus berijazah doktor dengan dasar sarjana pendidikan hukum (Pasal 15 ayat (2) huruf b) dan tidak menjadi anggota partai politik dalam 7 tahun terakhir (Pasal 15 ayat (2) huruf i); serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi yang melibatkan Komisi Yudisial. Keputusan MK untuk memeriksa permohonan pengujian yang menyangkut kepentingannya sendiri sempat menuai protes dan kritik dari masyarakat.

Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 1 dan 2/PUU-XII/2014, salah satu hakim konstitusi, Muhammad Alim, mengemukakan tiga alasan mengapa MK harus mengadili permohonan pengujian UU ini, yaitu: a) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini b) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya c) Kasus ini merupakan kepentingan konstiusional bangsa dan Negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri maupun kepentingan perseorangan hakim yang sedang menjabat.

Namun, di lain pihak ada pendapat bahwa sejatinya tidak pantas jika MK memutus perkaranya sendiri sebagaimana asas hukum *Nemo Judex ne procedat in propria causa*, artinya tidak seorangpun dapat jadi hakim yang baik

kalau ia mempunyai kepentingan sendiri dalam perkara yang ia adili, sehingga putusan MK itu perlu dikaji lebih lanjut.

Pembahasan yang tidak berlanjut

Beralih ke tahun-tahun sebelumnya, rupanya DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi ke dalam kolom RUU yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus, akan tetapi RUU ini tidak menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional tahun 2014 yang telah ditetapkan. Usut punya usut, rupanya pembahasan mengenai RUU tersebut merupakan bagian prioritas dari Prolegnas tahun 2010 dan tahun 2011, yang kemudian berhenti tanpa ada kelanjutan berarti. Ditambah lagi dengan huru-hara kasus Akil Mochtar, yang menyebabkan Perppu Nomor 1 tahun 2013 yang disetujui menjadi UU Nomor 4 tahun 2014 kemudian dibatalkan, salah satunya mungkin disebabkan karena substansinya yang tidak begitu jauh berbeda (bisa dilihat dalam tabel perbandingan di bawah) dair UU sebelumnya, sehingga menjauhkan harapan bahwa UU ini akan dapat berlaku tanpa digugat banyak pihak.

Dalam RUU perubahan UU No 24 tahun 2003 tersebut tidak disebutkan tentang uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK. Dalam naskah akademiknya, RUU ini lebih menekankan mengenai pengawasan hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK), tidak disebutkan pula adanya Panel Ahli yang dibentuk untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK. Lagipula jika dikaitkan dengan substansi pada putusan pembatalan UU Nomor 4 Tahun 2014, pembentukan Panel Ahli dinilai dapat mereduksi kewenangan DPR, Presiden, dan MA dalam pemilihan calon hakim MK.

MKHK diberi kewenangan untuk menjaga, mengawasi sekaligus sebagai kontrol perilaku serta penegakan kode etik para hakim konstitusi. Substansi ini juga disertakan dalam pembentukan UU Nomor 4 Tahun 2014 silam. Hal tersebut kemudian dibatalkan dengan alasan

karena adanya keterlibatan KY yang dinilai inkonstitusional oleh MK dan dikhawatirkan dapat mengganggu independensi MK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterlibatan KY dalam pembentukan MKHK dianggap tidak sesuai dengan pasal 24(B) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kewenangan KY hanya sebatas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.

Jika kita lepaskan terlebih dahulu hal-hal mengenai Majelis Kehormatan dan Penegakan Kode Etik tersebut, akan lebih menarik jika kita fokus pada satu substansi yang lain, yakni disebutkannya klausul Pemilukada secara tegas dalam lingkup kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan MK untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum telah diamanatkan dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini menarik, lantaran selama ini Pemilukada menjadi pembicaraan panas di antara para akademisi, apakah sengketa hasil Pemilukada memang benar termasuk kancan kewenangan MK mengingat adanya frasa “Pemilihan Umum” diperdebatkan konstitusionalitasnya oleh para akademisi, karena kewenangan itu sebelumnya dicantumkan dalam UU tersendiri, yakni UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Amat disayangkan, bahwa dalam prolegnas tahun-tahun selanjutnya, RUU ini tidak didaftar kembali sebagai RUU prioritas.

Dengan adanya desakan dari berbagai kalangan, perubahan terhadap UU MK memang perlu segera dibenahi, karena UU yang lama dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat dan negara. RUU perubahan tentang UU MK ini perlu dikaji lebih lanjut kekurangan serta kelebihanannya. Jika dibicarakan lagi, mungkin akan menghasilkan suatu penemuan yang baru dan bermanfaat demi kemaslahatan bersama, menjadi jawaban yang jelas atas pertanyaan para akademisi, praktisi hukum dan tentunya juga masyarakat, serta dapat menjadi pengaturan yang berlaku secara efektif. Ada harapan supaya dengan dilakukannya

Sumber Gambar: mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel Perbandingan Peraturan tentang MK

	UU 24 2003	UU 4 2014	RUU Perubahan UU No 24 2003
Persyaratan hakim konstitusi terkait partai politik	Larangan rangkap jabatan sebagai anggota partai politik, tidak ada ukuran waktu, berpendidikan sarjana hukum, berusia minimal 40 tahun	Seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat di antaranya berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum; berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan; pengangkatan dan tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.	Berpendidikan di bidang hukum (doctor dan magister), bertakwa dan berakhlak mulia; berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh dua) tahun pada saat pengangkatan;
Proses seleksi hakim konstitusi	Tidak disebutkan soal uji kelayakan dan kepatutan	Hakim konstitusi sebelum ditetapkan Presiden, Tidak disebutkan soal uji kelayakan dan kepatutan yang harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli	
Sistem Pengawasan hakim konstitusi	Tidak ada sistem pengawasan	Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap, terdiri dari 5 orang (dengan unsur: mantan hakim mk, akademisi, praktisi hukum dan tokoh masyarakat), putusan Majelis Kehormatan bersifat tetap)	Terdapat Majelis Kehormatan yang bertugas menegakkan kode etik Hakim Konstitusi, terdiri dari 5 orang dengan unsur 2 Hakim Konstitusi, 2 unsur akademisi dan Ketua Komisi Yudisial
Lingkup Kewenangan memeriksa perselisihan pemilu	Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum	Tidak ada perubahan	Lingkup kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum menjadi lebih luas meliputi pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, dan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah pasal 10 ayat (1) huruf d)

perubahan terhadap UU MK dapat membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK serta membangkitkan MK sendiri yang posisinya mulai tergoyahkan akibat berbagai konflik. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terbebas dari kepentingan apapun harus mau bangkit dan berbenah diri terlebih dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang lembaganya sendiri.

BURUH DAN KEADILAN

'Allamuddin Al Faruq

Kepala Departemen Riset dan Keilmuan Hukum
DEMA Justicia 2014 Kabinet Pilar Nusantara

*Hidup Buruh! Buruh bersatu tak bisa dikalahkan! Buruh bersatu menuntut kesejahteraan!
Itu yel-yel aksi dulu, Kalau sekarang harusnya yel-yelnya ditambahi, Buruh bersatu merebut kekuasaan!*
(Harsa Permata, Hari Buruh)

Bukan jarang lagi bila buruh mendapat perlakuan demikian adanya dan kurang mendapatkan sorotan dari masyarakat. Padahal sejatinya buruh adalah golongan yang tidak ada bedanya dengan profesi yang lain bahkan mereka yang bekerja pada orang lain pada dasarnya adalah sama-sama buruh juga. Tindakan-tindakan terhadap buruh yang seringkali dilakukan dengan cara represif dan tak jarang dengan kekerasan disebabkan pola pikir bahwa buruh adalah kelompok dengan pendidikan rendah yang untuk mengontrolnya harus dengan paksaan. Pola pikir macam ini adalah pola pikir yang tak lebih baik dari apa yang dilakukan pada pribumi pada zaman kolonial dahulu, dan masih bertahan hingga sekarang karena tidak berkembangnya cara berpikir untuk lebih merangkul buruh dengan cara yang humanis dan meninggalkan cara kekerasan.

Sejarah hari Buruh sendiri memang dimulai dari kesadaran pekerja untuk menuntut haknya, dilatarbelakangi jam kerja yang berlebihan dan upah yang rendah maka buruh di Amerika dan Eropa mengadakan unjuk rasa dan memprotes pemerintah dan pengusaha. Tapi tak jarang aksi protes damai tersebut disambut kekerasan dan aksi represif dari pemerintah. Dan yang paling terkenal adalah Kerusuhan Haymarket pada 1886 di Amerika dimana aksi ratusan ribu pekerja dibubarkan paksa polisi dengan menembaki demonstran yang telah beraksi secara damai selama 4 hari sejak 1 Mei dan banyak pekerja yang gugur disana ditambah pemimpin aksi

buruh itu ditangkap dan dihukum mati'. Kemudian pada tahun 1889 di Paris di konferensi Sosialis Dunia 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh sedunia dengan sebutan May Day sebagai bentuk mengenang peristiwa Haymarket dan sejak itulah semangat menuntut keadilan bagi pekerja menyebar ke seluruh dunia.

Kekerasan yang terjadi justru mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai bentuk anugerah-Nya tidak bisa lagi diganggu dan dilindungi oleh Negara dalam rangka menghormati harkat dan martabat manusiaⁱⁱ. Hak mendasar yang melekat sebetulnya tak ada kompromi lagi untuk dipenuhi, tapi terkadang sikap penolakan akan hak-hak yang dipenuhi tertutup karena tekanan dari atas dan buruh sendiri masih belum menyadari kekuatan yang ia miliki. Kekerasan terhadap pekerja kerap kali dilakukan, baik oleh pekerja di atasnya ataupun pihak lain memiliki kepentingan. Namun hanya sedikit yang terkespos dan diketahui, salah satu faktornya adalah ancaman teror dan ketakutan psikologis. Padahal hak-hak pekerja sendiri telah dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa perlu takut ada tekanan dari pihak tertentu. Menurut penulis sendiri salah satu yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman dari pekerja sendiri, disamping sedikitnya sosialisasi peraturan tentang perlindungan pekerja tetapi rendahnya pendidikan pekerja sendiri juga berpengaruh. Data menunjukkan rendahnya



kualitas angkatan kerja terlihat dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang masih mencapai 52 juta orang atau 46,95 persenⁱⁱⁱ.

Di Indonesia sendiri simbol perlawanan buruh yang hingga kini disebabkan oleh pelanggaran bahkan dikatakan kejahatan HAM adalah Kasus Marsinah. Marsinah yang merupakan buruh pabrik di Porong Sidoarjo yang ikut melakukan aksi protes buruh terhadap petinggi perusahaan akan tuntutan ketidakadilan yang menimpa buruh dikemudian hari ditemukan tewas dengan bekas siksaan yang amat parah dan kasusnya hingga kini masih gelap dan ada indikasi ditutup-tutupi^{iv}. Marsinah menjadi simbol betapa simbol elit penguasa dan pengusaha yang merasa dirinya tinggi dan berhak mengatur hak kehidupan buruh sehingga berani untuk mengancam bahkan melakukan pembunuhan terhadap buruh. Apalagi di masa orde baru buruh dan hak-haknya dibungkam, aksi buruh dikatakan subversif karena dinilai dekat dengan ajaran komunisme, serikat buruh dibatasi, dibonsai dan dikontrol oleh pemerintah. Bahkan Muchtar Pakpahan pendiri SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dikatakan subversif dan diancam hukuman mati karena dalam disertasinya untuk gelar doktor Ilmu Hukum di UI berisi pembelaan terhadap hak kaum buruh dan berakibat ia dipenjara oleh rezim orde baru hingga masa reformasi^v.

Masalah pelanggaran HAM pada pekerja juga seringkali berkaitan dengan diskriminasi gender, utamanya pada pekerja wanita. Pembagian beban kerja yang tidak sesuai, kesenjangan upah, dan kekerasan serta pelecehan seksual adalah masalah utama yang masih perlu disoroti untuk dapat dilakukan penindakan dan diselesaikan masalahnya^{vi}. Diskriminasi ini dikarenakan pekerja wanita masih dikategorikan sebagai kelas nomor dua dalam kelas pekerja dan dianggap sebelah mata dalam melakukan pekerjaan. Seakan untuk pekerja, hak asasi manusia pada dirinya berkurang dihadapan dengan siapa buruh itu bekerja. Padahal HAM adalah hak mutlak tiap manusia tanpa ada perbedaan disana.

Permasalahan terkait pengurangan hak-hak buruh ini kerap kali terjadi di negara berkembang, hal ini dikarenakan disana proses industrialisasi yang besar dan disertai potensi industri yang masih perlu digali lebih lanjut^{vii}. Permasalahan terhadap buruh seringkali terjadi bila ada buruh yang menuntut keadilan baik terhadap pemerintah maupun pengusaha, dengan tindakan represif, teror psikologi, skors, pemecatan, hingga kriminalisasi terhadap pekerja yang protes adalah bentuk yang umum kita saksikan. Maka menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat menegakkan peraturan terhadap pengusaha dan pabrik yang masih melakukan pengurangan dan pelanggaran hak terhadap buruh. Kemudian juga menegakkan keadilan terhadap buruh yang terkena kasus dengan pengusaha, artinya disinilah independensi kekuasaan kehakiman diuji ketika berhadapan dengan kasus seperti ini, apakah masih bisa objektif mencari kebenaran ataukah ada tendensi terhadap pekerja karena statusnya dibawah pengusaha.

Keadilan terhadap buruh juga tidak terbatas hanya pada pekerja dalam negeri tetapi juga pada pekerja migran yang berada di luar negeri. Dan juga dalam membuat dan menerapkan regulasi terkait pekerja ataupun industri secara umum jangan sampai ada kepentingan-kepentingan dari luar yang menginginkan pengaruhnya masuk ke regulasi tersebut agar ada keuntungan tertentu atau bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

ⁱ⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Buruh (diakses pada tanggal 3 April 2014)

ⁱⁱ⁾ Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

ⁱⁱⁱ⁾ Data Badan Pusat Statistik, Agustus 2013

^{iv)} <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/09/064479081/20-Kasus-Marsinah-Gelap-Aktivist-Nyalakan-Lilin> (diakses pada tanggal 3 April 2014)

^{v)} <http://metro.kompasiana.com/2014/05/01/yang-istimewa-pada-peringatan-hari-buruh-2014-hari-ini-652950.html> (diakses pada tanggal 3 April 2014)

^{vi)} <http://www.voaindonesia.com/content/aktivis-stop-diskriminasi-buruh-perempuan-/1776974.html> (diakses pada 3 April 2014)

^{vii)} <http://politik.kompasiana.com/2014/02/14/negara-berkembang-dan-sistem-pembagian-kerja-internasional-baru--635096.html> (diakses pada 3 April 2013)

KONSTELASI POLITIK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

Faiz Rahman

Wakil Kepala Departemen Media dan Informasi
DEMA Justicia 2014 Kabinet Pilar Nusantara

"Justice delayed is justice denied."

- William Gladstone.

Negara Hukum

Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga supremasi hukum haruslah ditegakkan di atas segalanya. Sudah lebih dari 15 tahun semenjak reformasi, hingga kini masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih belum mendapatkan kepastian hukum dan seakan-akan dilupakan seperti tragedi pembantaian tahun 1965, kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, kasus Talangsari pada tahun 1989, tragedi penghilangan aktivis pada tahun 1997-1998, tragedi Trisakti pada 1998, dan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

Tidak selesainya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu tidak serta merta dikarenakan tidak adanya konstruksi hukum yang baik yang mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat. Jika melihat tatanan hukumnya, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus tersebut seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, peraturan pelaksana dalam Perma, serta berbagai konvensi hukum internasional yang



digunakan di Indonesia seperti ICCPR dan ECOSOC. Perlu diperhatikan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sendiri dalam pengaturannya memasukan unsure politik di dalamnya.

Intervensi Politik

Intervensi politik dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu sebenarnya sudah terlihat dari beberapa contoh kasus yang telah disebutkan di atas seperti tragedi tahun 1965, kasus Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, tragedi penghilangan aktivis pada tahun 1997-1998, tragedi Trisakti pada 1998, kasus Talangsari pada tahun 1989, dan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Dalam kasus penghilangan aktivis pada tahun 1997-1998 terlihat bahwa Presiden mengabaikan rekomendasi dari DPR. Dalam rekomendasinya, DPR telah meminta agar Presiden membentuk Pengadilan HAM ad hoc, mencari para korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi bagi keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.¹ Kemudian dalam kasus lainnya, berkas perkara berhenti di Kejaksaan Agung. Menurut Domu P. Sihite, Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan Agung, mengatakan bahwa Kejaksaan Agung belum dapat menindak lanjuti

penyelesaian kasus-kasus tersebut karena sebelum penyidikan dilakukan, Pengadilan HAM Ad Hoc haruslah dibentuk terlebih dahulu.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu dalam hukum positif Indonesia dapat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc seperti yang tertulis pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM Ad Hoc sendiri dibentuk atas usul DPR atas peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Dapat terlihat dari ketentuan pasal tersebut bahwa peran Presiden dan lembaga politik seperti DPR memiliki peran yang besar dalam menentukan selesai atau tidaknya kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Sehingga meskipun berkas perkara dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung namun kebanyakan hanya berhenti disitu karena tidak ada tindak lanjut dari Presiden dalam merespon rekomendasi DPR untuk melakukan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Faktanya sampai saat ini sudah ada empat berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang berhenti di Kejaksaan Agung. **Pertama**, kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. **Kedua**, Kerusuhan Mei 1998. **Ketiga**, Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998. **Keempat**, Kasus Talangsari Lampung 1989. Tidak lanjutnya penyelesaian kasus-kasus tersebut salah satunya dikarenakan belum adanya Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk sehingga penyidikan tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Indonesia terlihat seakan *unwilling* dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Ketidakpastian Hukum dan Komitmen Presiden

Salah satu tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum. Hal inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat terutama para korban dan keluarga dari korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Tidak selesainya kasus-kasus tersebut rupanya berdampak psikologis bagi masyarakat terutama keluarga korban pelanggaran HAM berat tersebut. Sebagai contoh, keluarga dari korban

penghilangan aktivis secara paksa pada tahun 1997-1998 sampai saat ini hanya dapat berharap kasus tersebut segera diselesaikan sehingga keadilan pun bias didapatkan baik bagi korban maupun keluarga korban. Pemulihan korban secara massal pun tidak bias dilakukan tanpa adanya proses pengadilan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.

Konstruksi hukum yang kuat saja tidak cukup untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, factor politik pun bermain cukup kuat di sini. Presiden dapat dikatakan memiliki peran yang vital dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu karena tanpa adanya Keppres mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan pun tidak dapat dilakukan. Ketika Presiden SBY berkata memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam berbagai pidatonya namun faktanya tidak terlihat adanya usaha yang dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, dapat terlihat bahwa selama pemerintahan SBY belum ada satu Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk. Komitmen SBY dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat tersebut perlu dipertanyakan kembali. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi salah satu agenda yang mutlak harus dilaksanakan oleh pemerintah di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan bagi korban maupun keluarganya.

¹⁾ Otto Adi Yulianto, *Memetakan Hambatan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu*,

<https://docs.google.com/document/d/1mF2B3Pf-Cw38tnr2-U7hVQQW2Wt-QR9qqXO-xrtwqwI/edit>, diakses pada 10/05/2014

BERBEDA BUKAN BERARTI TAK BISA

Ageng Prabandaru & Pradipta W

30

PROFIL

Nama : Muhhamad Karim Amrullah
 Tanggal Lahir : Yogyakarta, 15 Juni 1994
 Pendidikan : SD Muhamadiyyah Caturtunggal
 SMP N 1 Depok Sleman
 MAN 1 Yogyakarta
 Organisasi :
 UKM Peduli Difabel UGM sebagai sekretaris
 Asian Law Students' Association LC UGM

“ Jangankan diskriminasi di pengadilan, dalam kehidupan sehari-hari orang menganggap difabel sebagai 'yang tidak mampu', padahal difabel itu artinya berbeda kemampuan dan berbeda bukan berarti tak mampu,” tutur Karim

Matahari pertengahan april menyinari sebuah gedung bertuliskan “IV” di sudut

selatan lingkungan Fakultas Hukum (FH) UGM kala itu. Di sela-sela kuliahnya sesosok laki-laki berperawakan mungil dan berpenampilan rapi menyempatkan diri untuk diwawancarai. Pemuda bernama Muhammad Karim Amrullah itu memiliki kemampuan yang berbeda dari orang pada umumnya. Sebagai seorang tuna daksa, Karim berbagi kisah hidupnya yang tentunya berbeda.

Diceritakan oleh anak kedua dari tiga bersaudara ini, kisah-kisah jatuh bangun hidupnya. Berawal dari kehidupan SD, dia menceritakan bahwa dirinya dulu adalah sosok yang nakal, periang, dan suka berbicara. Tidak menggubris keadaan fisiknya yang mempunyai kebutuhan berbeda, dia hidup layaknya anak-anak SD pada umumnya. Sama seperti kebanyakan anak SD yang mempunyai julukan sebagai pengganti nama panggilan mereka, seorang Karim juga memilikinya. Kala itu dia dipanggil dengan sebutan *T-Rex* oleh teman-temannya. Hanya diberikan alasan bahwa larinya cepat oleh orang-orang, dia belum mengetahui bahwa sebutannya timbul dari penggambaran fisiknya.

Lambat laun, akhirnya pemuda kelahiran 5 Juli 1994 ini mengetahui mengapa dia disebut demikian. Sosok periang dan nakal itu seketika berubah menjadi seorang yang pendiam dan pemurung. Tidak mau terkungkung pada rasa minder yang berlebih, Karim akhirnya mulai membangun kembali semangatnya. “Kalau begini terus malah memperburuk keadaan, makanya saya bertekad untuk bangkit,” jelasnya. Keadaan menjadi lebih baik karena dia terus mendapat dukungan dari orang-orang disekitarnya. Karim mengkisahkan kepedulian itu. Suatu waktu, di hari ulang tahun Karim, beberapa guru memberikannya sebuah hadiah unik berupa lampu berbentuk akuarium. Secarik kertas tertempel pada hadiah itu yang bertuliskan bahwa Karim harus tetap bersemangat dan Karim bisa serta mampu seperti orang lain.

Keadaan kembali memburuk saat dia duduk dibangku SMP. Diskriminasi, kala itu, bukan datang dari sekolah namun dari teman-teman sekolahnya sendiri. Teman-temannya merasa tidak boleh kalah oleh Karim yang waktu itu mulai menunjukkan bakatnya dalam menggambar. Namun semangat itu bukan dalam konteks positif sebagai motivasi, namun lebih pada ketakutan akan dianggap lebih buruk dari Karim dengan stigma negatif. Hal itu karena teman-temannya waktu itu menganggap Karim adalah orang yang lebih rendah dari pada mereka.

Menanggapi berbagai macam gempuran dalam hidupnya, dia memiliki sesosok ibu yang senantiasa menasihatinya dan memberikannya semangat. Jika ada orang yang meledek atau meremehkan Karim, ibunya selalu berpesan agar selalu berpikiran positif. Sang ibu menasihati supaya mendoakan orang yang mengejeknya nantinya akan diberikan pemahaman mengenai difabel. Pesan untuk mendoakan agar nantinya orang yang mengejek menjadi peduli pada difabel. “Ibu saya selalu berpesan untuk jangan pernah mendoakan orang yang mengejek agar mendapat celaka,” jelas Karim.

Menurut Karim, pada dasarnya manusia itu ingin memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari kebutuhan primernya hingga kebutuhan yang bahkan diluar kemampuannya. Selalu menginginkan sesuatu yang melebihi orang lain, dan tidak akan pernah terpuaskan. “Maka dari itu aku berpikir, kalau orang gak pernah bersyukur, kapan berhentinya semua keinginan itu,” tutur Karim.

Karim juga menceritakan salah satu pengalaman berkesannya. Dikisahkannya seorang Karim kecil pada bangku SD dan SMP jarang menorehkan prestasi. Suatu waktu di bulan-bulan libur transisi dari bangku SMP menuju SMA, Karim melangsungkan sebuah operasi besar. Kala liburan itu, dia diberi pilihan untuk melakukan operasi tulang belakangnya. *Skoliosis* yang dideritanya sudah membengkok hingga delapan puluh derajat. Hasilnya ada dua kemungkinan, yaitu antara tulang belakang menjadi normal kembali, atau harus kehilangan

nyawa akibat gagalnya operasi.

Dihadapkan pilihan hidup dan mati, Karim mendapati dirinya selama ini belum mampu membahagiakan orang tuanya. Dia menyempatkan untuk melakukan ibadah sholat *dhuha* sebelum operasi berlangsung karena ada jeda waktu akibat antrian. Kala itu dia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa jika masih diberikan kesempatan hidup, maka dia tidak akan pernah menyerah dan akan membahagiakan orang tuanya. Tujuh jam dilalui Karim tanpa sadar di ruang operasi. Hal yang pertama kali dia lakukan adalah bersyukur karena masih diberi kesempatan. Setelahnya dia sadar bahwa dia melewati ibadah sholat *dzuhur* dan sadar bahwa kedua orang tuanya tidak berada disampingnya. Kala itu paman dan bibinya yang berada di ruang rawat itu. Mereka menjelaskan bahwa kedua orang tuanya terlalu takut untuk mendampingi.

Butuh waktu satu tahun untuk bisa beraktifitas normal baginya. Baju besi yang dibutuhkan sebagai alat penunjang kesembuhan menemani kehidupannya sehari-hari. Baju yang terbuat dari kulit yang dilapisi besi itu harus dikenakannya setiap saat kecuali pada saat mandi dan tidur. “Memang tidak nyaman memakai baju itu terus, tapi ya aku harus menepati janjiku sendiri kan,” jelasnya.

Dia juga bersyukur bahwa dirinya diterima sebagai salah satu mahasiswa di FH UGM. Diakui bahwa ilmu politik dan ilmu pemerintahan lebih menarik dari ilmu hukum yang sekarang ini dipelajarinya. Namun di waktu proses memantapkan hati dalam memilih jurusan, banyak pertimbangan dari keluarga, kerabat, dan teman-temannya bahwa seorang Karim lebih baik belajar di FH saja. Menurut mereka, Karim memiliki logika yang bagus dan bakat dalam berpikir.

Pengalaman menariknya tidak berhenti disitu saja. Setelah melakukan daftar ulang di Direktorat Administrasi Akademik (DAA) UGM, Karim bertemu seorang Mukhanif Yasin Yusuf, seorang tuna rungu yang sekarang menjabat sebagai ketua UKM Peduli Difabel. “Aku sama

seperti kamu, tidak perlu malu, aku ingin mendirikan forum untuk mahasiswa difabel di UGM kamu mau bergabung tidak?” Ajak Mukhanif siang itu. Langsung saja Karim mengiyakan pertanyaan itu. Karim menjelaskan bahwa sebelumnya merupakan sebuah forum mahasiswa yang bernama Mahasiswa Difabel dan *Partner*. Diimbuhkan kata *Partner* dibelakangnya karena forum tersebut tidak hanya terdiri dari mahasiswa difabel saja, melainkan mahasiswa biasa yang peduli tentang isu difabel juga diperbolehkan bergabung.

Karim yang merupakan pendesain lambang dan pembuat AD/ART UKM itu juga menjelaskan bahwa perubahan nama menjadi UKM Peduli Difabel berasal dari saran Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Senawi, MP. Alasannya adalah selain membuatnya lebih sederhana juga dilatarbelakangi bahwa tidak semua mahasiswa yang bahkan seorang difabel, peduli akan isu ini.

Selain aktif di UKM itu, Karim juga merupakan anggota aktif *Asian Law Student Association* (ALSA) FH UGM. Dijelaskannya walaupun dia hanya aktif di kedua organisasi tersebut, Karim sering menerima undangan dari lembaga-lembaga baik pemerintah, swasta, maupun LSM terkait isu difabel. Salah satu contohnya dalam acara penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di hotel Melia Purosani oleh Komisi Yudisial dan SIGAP (Sasana Interogasi dan Advokasi Difabel).

Kedepannya, Karim ingin tidak hanya kalangan mahasiswa saja, namun juga masyarakat luas mengerti dan menjadi peduli tentang difabel. Hal itu didasarkan pada pengalamannya bahwa kalangan mahasiswa saja masih ada yang belum tahu apa itu difabel. Karim juga ingin menanamkan konsep ke masyarakat bahwa difabel itu bukan tidak mampu tetapi memiliki kemampuan yang berbeda. Menutup perbincangan sore itu, Karim menuturkan, “Kita merubah dari yang sederhana, contohnya mulai dari mahasiswa sebagai penerus bangsa, semoga mahasiswa bisa membawa isu difabel dengan lebih baik.”

Memobilisasi Kemuakan (2014)

Peresensi : Hilman Fathoni



Judul Album : VA – Kompilasi Memobilisasi Kemuakan (2014)

Label Rekaman : Grimloc Records

Tahun Rilis : 2014

Tracklist :

1. Gugat - Funeral
2. Eyes Of War - Believe Your Choice
3. Eyefeelsix - Manifes
4. Godless Symptoms - Yakin Takkan Memilih
5. Wreck - We Drift Like Dandelions
6. Ayperos - Menolak
7. Jagal Sangkakala - Tamak
8. Milisi Kecoa - Bukan Untukku!
9. Resist - Never Trust Government
10. wethepeople! -
11. Bars Of Death - All Cops Are God
12. SSSLOTHHH - Deep, Far, And Beyond

Link download :

http://www.mediafire.com/download/ja2i740og2cq5uq/Memobilisasi_Kemuakan+%282014%29.zip

“Seperti disebutkan Max Lane, praktek politik demokrasi elitis yang sepenuhnya dikuasai oleh elite lama itu telah membuat rakyat kebanyakan mengalami alienasi. Kenyataan ini bisa dilihat secara kasat mata. Masyarakat luas makin menyadari bahwa pemilu hanya menjadi ajang para politisi korup untuk mendulang suara. Selama tiga periode elektoral (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014), mereka menyaksikan praktik demokrasi semakin elitis, semakin jauh dari kepentingan rakyat. Dengan persepsi yang meluas ini, pemilu – bahkan demokrasi – dianggap tidak relevan dengan masalah kehidupan sehari-hari mereka.”

-Kutipan diambil dari tulisan berjudul Golongan Putih

Kutipan artikel tersebut saya salin dari berkas digital dengan format ekstensi *.pdf* yang saya dapatkan sebagai bonus dengan mengunduh secara gratis berkas digital dengan format ekstensi *.zip* beserta 12 *track* berkas digital dengan format ekstensi *.mp3* dengan judul “Kompilasi Memobilisasi Kemuakan” yang telah beredar luas di dunia maya sejak sekitar pukul 8 pagi, pada hari Selasa tanggal 8 April 2014. Inilah strategi ini telah disiapkan oleh **Grimloc Records**, salah satu label rekaman independen yang berbasis di kota Bandung, untuk menyambut dimulainya 'pesta demokrasi' yang akan segera dirayakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesta demokrasi dimana masing-masing individu yang merupakan warga negara Indonesia berhak atas satu suara untuk memilih wakil-wakil yang diharapkan nantinya bisa mewakili keinginan masing-masing individu tersebut. Telah saya sebutkan dalam salinan kutipan artikel pada bagian paling awal dari tulisan ini, bahwa individu-individu yang diharapkan akan memiliki peran sentral dalam 'pesta demokrasi' sudah terlihat begitu muak, dengan segala bentuk iming-iming politisi demi mengejar suksesi 'pesta demokrasi'. Demokrasi kotak suara dianggap sudah malfungsi, janji politisi dipandang sebagai ilusi, rakyat lebih memilih mandiri, pergi menyongsong demokrasi sejati.

Disini, ada 12 band dari satu domisili yang dengan sukarela berpartisipasi. Meluapkan amarah dan kemuakan kolektif ini melalui karya-karya *original* dari masing-masing band, dipersatukan dengan nama “Kompilasi Memobilisasi Kemuakan”. Dalam suatu wadah kompilasi yang didistribusi oleh **Grimloc Records** dengan diunggah ke dunia maya supaya

mudah terdistribusi dari tautan yang satu ke tautan yang lainnya. Seperti yang bisa kita lihat dari judul kompilasi ini, ya, kompilasi ini menghendaki sebuah mobilisasi, ya, mobilisasi kemuakan dari tiap entitas yang berpartisipasi dan mereka yang merasa satu bunyi. Nampak terlihat bahwa label rekaman dari rilisan ini tidak mengkurasi melalui *ragam bunyi* atau *genre musik* macam apa yang dimainkan oleh tiap proyek musik yang berpartisipasi. **Grimloc Records** murni melihat dari niat, konten dari lagu-lagu yang mereka bawaan, dan *mungkin* juga dilihat dari *attitude* dari masing-masing band. Bisa kita lihat sebagai contoh betapa jauh tipe dalam konteks kobaran nada yang dimainkan oleh **Wreck**, dengan *DC Sound post-hardcore* yang begitu manis jika dibandingkan **Eyefeelsix** yang membawa unsur *rapcore* dalam music *hip-hop* mereka. yang terdengar lebih begitu pedas. Bisa kita lihat bahwa kedua band dengan latar belakang bebunyian yang begitu berbeda, bisa sama-sama menyemarakkan kemasan digital mobilisasi ini dalam lirik yang mereka teriakan. Berikut ini penggalan kalimat dari “*We Drift Like Dandelions*” oleh **Wreck** : *You said : “Let's join with us and gimme your dignity, so I will pay your dreams!” / I said : “Eat a dick, I'll mock you. You're truly an assholoe bastard”* dan berikut penggalan kalimat dari “*Manifes*” oleh **Eyefeelsix** : *Memilih untuk tidak memilih lebih baik berdalih dengarkan mereka bertasbih dengan mulut berbuih.* Meskipun begitu berbeda dalam presentasi musikalitas dan ketika presentasi bertemu selera masing-masing pendengar dalam suatu dimensi, kedua band diatas, serta band-band lain yang ada dalam kompilasi ini, sama-sama menggambarkan kemuakan dengan sistem demokrasi kotak suara melalui bunyi. Sehingga disini, saya nilai **Grimloc Records** telah menjalankan fungsi kurasinya dengan ideal. Dalam suatu kompilasi, bentuk mobilisasi kemuakan digital ini, dengan tema krusial dan aktual, dapat sekaligus berperan

sebagai penyatu selera para pecandu bunyi, untuk menjelajahi banyak *ragam bunyi* dalam suatu kompilasi yang menjadi media informasi tentang bobroknya pelaksanaan demokrasi di suatu negeri. Oh iya, bonus lain dari kompilasi ini adalah bagi kalian yang rindu dengan suara lantang **Morgue Vanguard (Ucok Homicide)** dan **MC Sarkasz**, beliau akan mengobati kerinduan anda-anda sekalian melalui proyek terbarunya yang bernama **Bars of Death**.

Dan lagi, cara yang dipilih dengan menggratis unduh kompilasi ini, dalam suatu aksi yang menghendaki suatu mobilisasi adalah pilihan yang tepat dengan melihat bagaimana internet telah menjadi hal yang cukup sentral dalam kehidupan manusia, khususnya para pecandu bunyi. Namun alangkah lebih baiknya ketika mereka akan menerbitkan rilisan digital lewat dunia maya, agar terlebih dahulu benar-benar memilih perangkat lunak yang paling stabil lalu lintas pendistribusian berkas digitalnya di dunia maya. Karena, ketika **Grimloc Records** membagikan tautan unduh tunggal kompilasi tersebut melalui *website* resmi mereka, yang terjadi malah *website* resmi mereka *down* karena lalu lintasnya yang terlalu ramai. Untung saja banyak kawan-kawan di jejaring sosial yang secara spontan menggunggah ulang berkas

digital kompilasi tersebut ke tautan-tautan unduh lain agar tetap dapat diakses oleh para pecandu bunyi. “*Sekali lagi, kami tidak mengajak kalian golput, namun lebih dari itu kami mengajak kawan2 mempertanyakan fondasi dari demokrasi kotak suara*”, kicau **Grimloc Records** melalui akun twitter mereka. Saya cuma mau mencoba membuat sebuah *epilog*. *Epilog* yang netral. Tanpa bicara benar dan salah dalam atikel resensi ini. Bahwa setiap sistem atau ideologi, entah itu kapitalis atau anarkis, demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Masing-masing ideologi akan tetap menjadi penyaji mimpi atau ilusi. Bila manusia-manusia yang beralienasi ini tak lekas mencoba distimulasi dengan suatu wacana tentang mobilisasi. Dalam hal ini, praktik mobilisasi kemuakan yang dikristalisasi oleh **Grimloc Records** dan seluruh peserta kompilasi melalui “Kompilasi Memobilisasi Kemuakan” saya rasa telah menjadi sebuah produk stimulan yang sakti, dan sangat disarankan untuk segera dikonsumsi, bagi mereka yang telah beralienasi, karena ini bukan sekedar cacik, dan juga bukan sekedar bunyi, ini adalah buah kemuakan dari palsunya suatu praktik demokrasi.

HALF MOON

Part 2

Agnes Sulistya



Pria itu hanya menghela napas dan meminum tehnya. “Anda tahu, kafe ini sudah berdiri selama dua puluh tahun. Yah, dibandingkan dengan kafe-kafe yang lain di sekitar sini, tempat ini memang tidak istimewa. Namun ada satu hal yang dimiliki tempat ini tidak dimiliki tempat lain,” tatapan dari matanya yang dalam itu menyiratkan sesuatu. “Apa itu?” Desta bertanya sebelum bisa menghentikan dirinya.

“Di tempat ini, kamu akan bertemu dengan seseorang.”

Desta masih diam sambil menyembunyikan keterkejutannya mendengar pria itu.

“Kamu lihat dua orang yang ada di sana?” Pria itu menunjuk pada dua orang--laki-laki dan perempuan--yang duduk di beranda. “Mereka bertemu di sini, sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan kali ini mereka mengunjungi tempat ini bersama.” Kemudian pria itu menunjuk pada seorang wanita yang sudah tua, rambutnya sudah memutih. “Suaminya meninggal beberapa hari yang lalu. Mereka berdua bertemu di sini. Setelah menikah, suaminya masih sering berkunjung ke tempat ini”. “Oh, saya turut berduka.” Pria itu tersenyum. “Awalnya dia hanya ke tempat ini saat akhir pekan, namun setelah beberapa waktu dia terkadang ke sini sepulang kerja untuk minum

teh sambil menikmati pemandangan. Saya terkadang menyempatkan untuk mengobrol dengannya dan kami berdua nampaknya cocok satu sama lain.” Senyum akhirnya tampak dari wajah Desta. “Sepertinya tempat ini penuh kenangan bagi Anda, Pak.” Dia menghela napas sebelum menjawab pertanyaan Desta. “Tempat ini bernilai lebih dari apapun dalam hidupku, kecuali satu..”

Kalimat itu benar-benar menggantung dan mengambang berat bagi Desta tetapi dia sudah mengetahui maksud pria ini.

“Ada satu hal lagi.”

“Anda lihat pria yang duduk di dekat meja kasir?”

“Yang baru saja masuk? Bukankah dia juga teman Bapak?”

“Ya, memang.” Desta menunggu pria asing untuk menceritakan kisahnya.

“Lalu apa kisahnya?”

Saat itu juga pria yang duduk dekat meja kasir berdiri, membayar di meja kasir dan sedikit mengobrol dengan kasir itu. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan pria itu menuju ke meja mereka.

“Sudah saatnya kamu pulang?” Pria asing bertanya akrab padanya sambil melirik

arloji di tangannya. “Yah, ada pekerjaan yang harus kukerjakan sekarang.” “Ah, aku ingat. Malam ini pertandingan final, kan?” “Ya, benar. Aku tak mau melewatkannya kali ini.” “Haha, aku ingat tahun lalu saat kau melewatkan pertandingan final karena kecelakaan konyol itu.” “Jangan ingatkan aku soal itu. Aku akan ke sini lagi besok.” “Haha, aku hanya bercanda. Sampai jumpa, Don.” Pria itu mengangguk pada Desta dan segera melenggang keluar dari kafe.

“Tampaknya Bapak sudah lama mengenalnya.”

“Ya, dia temanku sejak kecil.”

“Lalu kisahnya..”

Pria itu tersenyum hangat sebelum mengatakan, “Kamu baru saja mendengar sebagian dari ceritanya.”

Desta melihat keluar jendela, memandang pria itu yang kian menjauh dari kafe tempat mereka berada dan menyebrang. “Dia. Kupikir Anda.” “Dia memiliki keberanian. Dan dia pernah mempertaruhkan hal yang sangat berarti baginya,” “Apa yang pernah dia pertaruhkan?” “Persahabatan kami.” Selama satu menit tidak ada satu pun dari mereka yang mengatakan sesuatu. “Bagaimana denganmu, Nak? Kau mau bercerita padaku?”

“Aku, aku akan mengatakan padanya.”

Desta meraih dompet saat pria tua itu menahannya. “Anggap saja hari ini penawaran istimewa dariku.” Desta mengucapkan terima kasih padanya dan beranjak keluar. Ketika sampai di pintu depan dia mendengar seseorang memanggil pria asing itu. “Pak Alrick, bisa kami meminta secangkir teh dan kopi untuk kami berdua?” “Tentu saja, tunggu sebentar anak-anak,” kata pria itu yang ternyata biasa dipanggil Pak Alrick. Ketika Desta sudah sampai di beranda, dia melihat papan nama kafe itu. *Alrick's Cup of Coffee.*

Ketika akan berjalan menjauhi kafe itu, Desta melihat pantulan sinar temaram yang berasal dari bawah. Desta mendekatinya dan melihat sebuah plakat perak yang bersinar tertempa cahaya lampu, tertanam di tembok bagian bawah yang sedikit tersembunyi. Desta menyentuhkan jarinya dan merasakan

permukaan yang kasar, ada sebuah ukiran di sana. Hanya dua baris. 'Untuk Lea. Aku selalu menunggumu di sini.'

Desta serasa ingin kembali ke dalam dan melemparkan pertanyaan yang bisa dia pikirkan. Namun alih-alih berdiri dan masuk lagi ke dalam, Desta memilih untuk mengikuti takdirnya hari ini. Pria yang bernama Alrick itu benar, dia akan bertemu seseorang hari ini, atau paling tidak dia yang akan menemuinya.

Senja yang gelap telah menggantung di langit kota tepi pantai ketika Desta sampai di suatu tempat. Dia memasuki tempat itu dan tidak lama kemudian menemukan yang dia cari. “Anna, aku bertemu seseorang hari ini, dan dia tahu kalau aku akan menemui seseorang. Awalnya aku sedikit ragu, tapi sekarang aku yakin.” Angin senja bertiup menerbangkan dedaunan dan kenangan yang pernah terkunci di suatu hari di masa lampau. “Aku mengerti aku memang sudah terlambat, tapi aku tetap harus mengatakannya padamu.” Desta menunggu sebuah jawaban, namun hanya kesunyian yang dia dapatkan.

“Anna, aku mencintaimu. Selalu.”

Desta berdiam untuk beberapa waktu, menunggu jawaban apapun. Namun tentu saja tidak akan pernah ada jawaban. Pada akhirnya dia menyerah, kemudian berdiri dan beranjak pergi. Meninggalkan nisan putih yang dingin itu disirami cahaya bulan yang hanya tampak setengah pada hari itu. (*Ash*)

BANGUN DARI DUNIA RETAK

29 Maret 2013

Djendelo Koffie

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!” ujar Soekarno.

Mungkin karena Soekarno, senja itu aku berada di ruangan temaram ini. Aku menggenggam buku berjudul Berpijak di Dunia Retak karya Basuki Raharjo, sambil duduk bersila diantara kerumunan jiwa yang haus fakta tentang apa yang dituliskan Basuki. Beberapa orang paruh baya sebagai saksi hidup terlihat menyembunyikan duka. Sebagian kawula muda terlihat berusaha menafsirkan peristiwa sosial apa yang ada di hadapannya. Segerombolan priyayi berbaju batik menatap kosong ke depan, mereka adalah keluarga Basuki yang sedang belajar mengikhlaskan. Acara bedah buku BPPM Mahkamah kali ini seperti mengumpulkan kepingan diorama sejarah.

Empat kursi di depan sebagai pusat. Ada seorang yang ingin kami dengar kisah nyatanya, siapalagi kalau bukan Basuki Raharjo. Lantas ada dua orang yang mengapitnya yaitu; Rama Baskara T. Wardaya seorang sejarawan bermata teduh dan Guntur Narwaya seorang peneliti dari PUSHAM UII. Mereka bertutur dengan dipadu seseorang berbaju hitam.

Terlalu banyak yang terurai dari kontemplasi mereka bertiga. Maka aku diseret pula dalam pusara fakta masa lalu itu. Aku tidak akan sendirian merenungkannya, aku akan membawamu ikut turut berkontemplasi bersamaku.

Basuki Raharja, hanya salah satu dari keluarga 1,5 juta orang yang disiksa dengan alasan labelisasi PKI. Walaupun dia sempat berpikir keluarganya akan tenggelam karena tidak ada harapan sedikitpun untuk berjalan ke depan. Namun Basuki dan keluarganya sudah ikhlas memaafkan segala hal yang membuat keluarganya berpijak di dunia retak.

Rekonsiliasi? Menurutnya itulah harapannya kini, sebab hingga kini belum ada lembaga yang menetralkan kondisi sejarah yang pernah dia alami.

Sedangkan Rama Baskara T. Wardaya menekankan ada dua syarat rekonsiliasi yaitu : truth seeking, mencari tentang apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu; dan truth telling, orang-orang yang terlibat pada peristiwa, para ahli, korban, dan juga pemerintah harus bicara apa yang sebenarnya terjadi. Ini penting sebab rekonsiliasi adalah bagian agar kita tahu tujuan masa depan.

Guntur Narwaya, mengemukakan hal yang berbeda. Menurutnya rekonsiliasi harus menjadi momen membangun kejujuran dan kebenaran sejarah. Kebenaran sejarah untuk membangun proses membangun bangsa. Hal tersebut supaya generasi baru dapat membuka pikiran dan tidak terpancing segala pluralisme masyarakat. Rekonsiliasi bukan masalah benar atau salah, tapi pemaafan dan pengampunan.

Jangan sekedar membaca, coba renungkan seberapa pentingnya rekonsiliasi. Lantas bangunkan aku dari dunia retak ini secepatnya. Aku lelah menjadi bagian yang terlupakan.

Dan jika kamu bertemu pria berbaret merah katakan padanya.

“Aku masih menolak lupa.”

Sekar.



SELAMAT ATAS KELULUSANNYA

ERDHA WIDHAYANTO
Pemimpin Redaksi 2013

HALIM PRADANA
Redaktur Pelaksana 2013

CHANDRA PURNAMA PUTRA
Awak Redaksi

Pemimpin Redaksi 2013

Redaktur Pelaksana 2013

Awak Redaksi

IKLANKAN
PRODUKMU
DI SINI!

Contact Person:
081903798198 (Pitra)



Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa

Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada
Jalan Socio Yustisia, Bulaksumur, Sleman
55281